

PRILAKU EKONOMI DALAM ISLAM

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. ” (QS. Adz-Dzariyat : 56)

“Katakanlah: Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir.” (QS. Al Israa : 100)

Pendahuluan

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan karakteristik ekonomi Islam, bahwa focus pembahasan ekonomi Islam pada hakekatnya terletak pada penyikapan manusia pada harta. Termasuk di dalamnya semua prilaku manusia dalam mencari harta (produksi), menyimpan harta (mengelola kekayaan) dan membelanjakan harta (konsumsi). Dalam Islam sangat jelas sekali panduan manusia dalam menyikapi harta, yaitu apa yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...” (QS. An Nisaa: 5).

Fungsi harta sebagai pokok kehidupan memiliki pengaruh pada prilaku manusia dalam produksi dan konsumsi dari harta yang mereka punya. Pokok kehidupan disini bukan hanya menjaga berlangsungnya kehidupan si pemilik harta tapi juga bermakna bahwa harta yang dimiliki itu dapat menjamin berlangsungnya kehidupan secara luas (kehidupan manusia selain pemilik harta tersebut). Karena peran manusia dalam Islam bukan hanya terfokus pada dia secara pribadi tapi juga pada lingkungannya, yaitu pada interaksi manusia dengan manusia lain.

Seperti yang telah di sebutkan pada pembahasan terdahulu, bahwa ada empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al Qur'an:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), bermakna juga bahwa tindakan-tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan memuaskan keinginan (*wants*).
2. Implementasi Zakat (*implementation of zakat*); pada tingkat negara mekanisme zakat adalah *obligatory zakat sistem* bukan *voluntary zakat sistem*. Disamping itu ada juga instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.

3. Penghapusan/pelarangan Riba (*prohibition of riba*); menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen mudharabah dan musharakah sebagai pengganti sistem kredit (credit sistem) berikut instrumen bunganya (*interest rate*).
4. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*); dari produk atau komoditi, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi haruslah ada dalam kerangka halal. Usaha-usaha tadi tidak boleh bersentuhan dengan judi (maisir) dan spekulasi (gharar).

Dari empat prinsip utama ini terlihat jelas corak dari perilaku manusia Islam dalam menyikapi harta. Harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk menumpulkan pahala demi tercapainya falah (kebahagiaan dunia dan akherat). Selain itu Islam memang memandang bahwa segala apa yang ada didunia ini (diatas bumi maupun yang terpendam di dalamnya) adalah milik Allah SWT, sehingga pada hakikatnya apa yang dimiliki manusia itu hanyalah sebuah amanah. Dan nilai amanah itulah yang menuntut manusia untuk menyikapinya (harta) dengan benar. Pembahasan harta ini secara mendalam telah kita bahas pada topik sebelumnya.

Sedangkan dari perspektif konvensional, harta merupakan asset yang menjadi hak pribadi seseorang. Sepanjang proses kepemilikan harta tadi tidak melanggar hukum atau undang-undang, menjadi hak si pemilik hartalah kemana harta tersebut akan dipergunakan. Jadi perbedaan Islam dan konvensional dalam penyikapan harta ini terletak dari cara pandangnya, Islam cenderung melihat harta berdasarkan *flow concept* sedangkan konvensional cenderung memandangnya berdasarkan *stock concept*¹.

Iman Dan Prilaku Ekonomi

Pada dasarnya elemen yang sangat penting dalam Islam sebagai sistem hidup adalah akidah. Dan akidah menjadi inspirasi atau pedoman utama aktivitas kehidupan manusia melalui kepercayaan, keyakinan atau yang biasa kita kenal dengan iman. Iman dimaknakan sebagai sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diaplikasikan dengan amal. Jadi iman menentukan bentuk final dari sebuah keyakinan dalam hati yaitu amal, perbuatan, tindakan atau perilaku. Dalam ekonomi keimanan Islam kemudian membuat tindakan ekonomi manusia muslim akan sangat mencerminkan keyakinannya, misalnya keyakinan pada perintah Tuhan bahwa *khamar* (minuman yang memabukkan) haram maka tindakan konsumsi, produksi dan distribusi manusia tentu akan menjauhi produk khamar tersebut.

Dengan demikian iman dari seorang manusia pada Tuhan dengan segala konsekwensinya, merupakan factor penentu dari eksistensi kemanfaatan Islam sebagai

¹ Oleh Adiwarmarman Azwar Karim secara detil harta dikelompokkan dalam pembahasan uang dan kapital, menurut beliau uang dalam Islam adalah *public goods* yang bersifat *flow concept* sedangkan kapital merupakan *private goods* yang bersifat *stock concept*. Sementara itu menurut konvensional uang dan kapital merupakan *private goods* dan - masih menurut Adiwarmarman - ada perbedaan pendapat dalam menentukan sifat uang dan kapital. Bagi Irving Fisher uang dan kapital bersifat *flow concept* ($MV=PT$) sedangkan Cambridge School melihat uang dan kapital bersifat *stock concept*. Lihat Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT Indonesia), 2002, pp. 19 – 22.

sistem hidup ditengah-tengah manusia. Sehingga pada tingkatan praktis, perilaku ekonomi (*economic behavior*) baik memotivasi tindakan maupun bentuk tindakan itu sendiri, sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang. Lebih spesifik keimanan pada akhirnya akan membentuk kecenderungan perilaku konsumsi, produksi dan distribusi manusia baik individu maupun berkelompok (kolektif) dalam perekonomian. Jadi dapat disimpulkan ada tiga karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi.

1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh tiga motif utama tadi; masalah, kebutuhan dan kewajiban.
2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (*materialisme*) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis.
3. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis (*selfishness*); ego, keinginan dan rasionalisme.

Dari asumsi di atas, diketahui iman kemudian menjadi faktor yang cukup signifikan dalam membedakan corak perilaku ekonomi Islam dengan perilaku ekonomi konvensional. Jadi jika dilihat dari awal, faktor Tuhan kemudian mempengaruhi corak aktivitas ekonomi melalui perilaku manusia itu sendiri. Oleh sebab itu Islam begitu menaruh perhatian yang sangat besar pada pembentukan manusia dalam rangka memperoleh bentuk sistem perekonomian yang lebih baik yaitu sistem ekonomi Islam. Setelah pembentukan manusia dan interaksi antar manusia, baru kemudian Islam memberikan panduan pelaksanaan, tatacara perekonomian, ketentuan syariat, kebijakan dan institusi ekonomi dalam rangka aplikasi perekonomian. Sehingga betul-betul akan terlihat bahwa Islam begitu komprehensif mengatur sistem perekonomian.

Berikutnya akan kita lihat perbedaan ekonomi Islam dan konvensional dalam hal penyikapan harta ini dengan lebih spesifik pada perilaku konsumsi dan produksi. Jadi dalam teori ekonomi Islam, diakui bahwa nilai di luar diri manusia dapat membentuk perilaku, dalam hal ini nilai moral yang bersumber dari agama atau ideologi yang dianut pelaku ekonomi Islam (muslim). Pada bab-bab selanjutnya akan dijelaskan berbagai perilaku manusia baik konsumsi, produksi, distribusi, menabung dan investasi yang dipengaruhi oleh iman. Berdasarkan perilaku ekonomi seperti ini, buku ini menawarkan variabel – variabel ekonomi yang khas dalam model – model ekonomi. Dan dari fenomena inilah kemudian variabel – variabel tersebut dapat dijadikan ukuran – ukuran atau parameter – parameter baru untuk menentukan keberhasilan atau bahkan kebijakan ekonomi dalam kerangka sistem ekonomi Islam.

Berbeda dengan klaim konvensional yang mengaku bahwa ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai, karena memang betul betul berdasarkan pada nilai yang dibawa secara alamiah yang ada dalam diri manusia. Sehingga siapapun manusianya sumber motifnya sama yaitu nilai alamiah yang ada didirinya. Jadi karena tak bergantung pada ideologi

yang dianut tersebut, maka konvensional mengklaim bahwa ekonomi tersebut (sepatutnya) bebas nilai. Padahal kini mulai diakui bahwa nilai alamiah dalam diri manusia itulah yang kemudian membentuk perekonomian konvensional menjadi bangunan yang begitu rapuh dan bermasalah, bukan hanya secara fisik tapi juga pondasi sistemnya. Nilai alamiah seperti ego, rasionalitas dan materi membentuk perekonomian konvensional menjadi sangat individualistik, materialistik dan konsumeristik. Hal ini yang kemudian membuat ekonomi konvensional bukan hanya berurusan dengan masalah fenomena fisik ekonomi tapi juga permasalahan social yang lebih bersumber dari pelaku-pelaku ekonomi secara pribadi, seperti motif-motif individualistik tadi.

Kebutuhan Versus Keinginan

Aktivitas ekonomi memang berawal dari kebutuhan fisik manusia untuk dapat terus hidup (*survive*) di dunia ini. Segala keperluan untuk bertahan hidup akan sekuat tenaga diusahakan sendiri, namun ketika keperluan untuk hidup itu tidak dapat dipenuhi sendiri dan kehidupan manusia memang tidak bersifat individual tapi social (kolektif), maka terjadilah interaksi pemenuhan keperluan hidup diantara para manusia. Interaksi inilah yang sebenarnya merepresentasikan interaksi permintaan dan penawaran, interaksi konsumsi dan produksi, sehingga muncullah pasar sebagai wadah interaksi ekonomi ini.

Pemenuhan keperluan hidup manusia ini secara kualitas memiliki tahapan-tahapan pemenuhan. Berdasarkan teori Maslow, keperluan hidup itu berawal dari pemenuhan keperluan hidup yang bersifat kebutuhan dasar (*basic needs*), kemudian pemenuhan keperluan hidup yang lebih tinggi kualitasnya seperti keamanan, kenyamanan dan aktualisasi. Namun perlu dipahami bahwa teori Maslow ini jelas merujuk pada pola pikir konvensional yang menggunakan perspektif individualistic-materialistik.

Sementara dalam Islam tahapan pemenuhan keperluan hidup dari seseorang atau individu boleh jadi memang seperti yang Maslow gambarkan, tapi perlu dijelaskan lebih detail bahwa pemenuhan keperluan hidup setelah tahapan pertama (pemenuhan kebutuhan dasar) akan dilakukan ketika memang secara kolektif keperluan kebutuhan dasar tadi sudah pada posisi yang aman. Artinya masyarakat luas (umat) sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga tidak akan ada implikasi negatif yang nanti muncul akibat pemenuhan kebutuhan dasar kolektif tadi yang belum sempurna terwujud. Jadi diperlukan peran suatu otoritas atau negara dalam memastikan itu semua. Seperti yang nanti dijelaskan dalam bab selanjutnya, bahwa memang ada beberapa mekanisme dalam sistem ekonomi Islam yang tidak akan berjalan efektif jika tidak ada campur tangan negara.

Selain itu perlu dipahami juga bahwa parameter kepuasan Islam bukan hanya terbatas pada benda-benda konkrit (materi), tapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal shaleh yang manusia perbuat. Atau dengan kata lain, bahwa kepuasan dapat timbul dan dirasakan oleh seorang manusia muslim ketika harapan mendapat kredit poin (pahala) dari Allah SWT melalui amal shalehnya semakin besar. Pandangan ini tersirat dari bahasan ekonomi yang dilakukan oleh Hasan Al Banna.² Beliau mengungkapkan firman Allah yang mengatakan:

² Hasan Al Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Intermedia, Jakarta 1997. pp. 387-409.

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin.” (QS. Lukman: 20)

Apa yang diungkapkan oleh Hasan Al Banna ini semakin menegaskan bahwa ruang lingkup keilmuan ekonomi Islam lebih luas dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT.

Umer Chapra (2000) mencoba menjelaskan maksud Imam Al Ghazali dalam mendefinisikan fungsi syariah dalam Islam. Al Ghazali mendefinisikan bahwa fungsi Syariah adalah untuk mensejahterakan seluruh manusia melalui perlindungan agama, diri manusia, akal, keturunan dan harta. Chapra menyimpulkan bahwa dengan memasukkan jiwa manusia, akal dan keturunan di dalam model-model ekonomi, adalah mungkin untuk menciptakan kepuasan yang seimbang dari berbagai kebutuhan manusia.

Dari pembahasan keperluan hidup manusia dan tahapannya tadi, sebenarnya juga penting untuk di bahas apa perbedaan kebutuhan dan keinginan yang dalam perekonomian Islam mendapat perhatian tidak kurang besarnya. Karena kedua motif tadi akan dengan signifikan membedakan corak atau karakteristik aktivitas ekonomi.

Islam memiliki nilai moral yang begitu ketat dalam memasukkan “keinginan” (*wants*) dalam motif aktivitas ekonomi. Mengapa? Dalam banyak ketentuan perilaku ekonomi Islam, dominasi motif “kebutuhan” (*needs*) menjadi nafas dalam perekonomian bernilai moral Islam ini, bukan keinginan. Apa perbedaan dan konsekwensinya?

Kebutuhan (*needs*) lebih didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Sementara keinginan (*wants*) didefinisikan sebagai *desire* (kemauan)³ manusia atas segala hal. Jadi ruang lingkup definisi keinginan akan lebih luas dari definisi kebutuhan. Contoh sederhana dalam menggambarkan perbedaan kedua kata ini dapat dilihat dalam konsumsi manusia pada air untuk menghilangkan dahaga. Kebutuhan seseorang untuk menghilangkan dahaga mungkin akan cukup dengan segelas air putih, tapi seseorang dengan kemampuan dan keinginannya dapat saja memenuhi kebutuhan itu dengan segelas wishky, yang tentu lebih mahal dan lebih memuaskan keinginan.

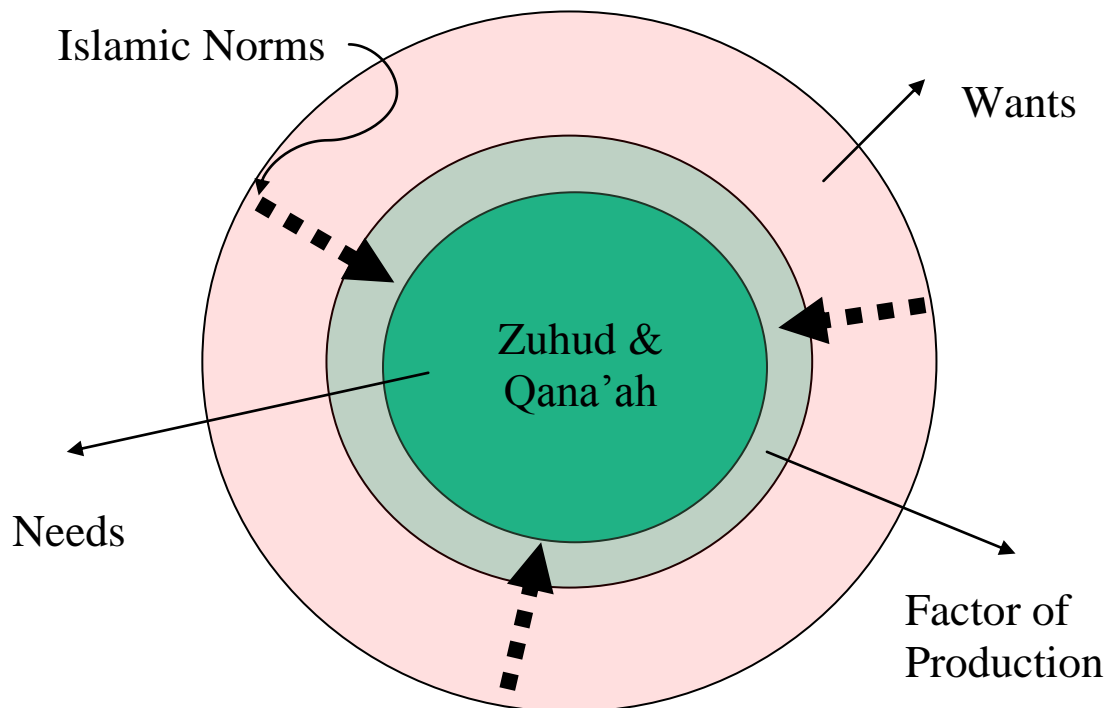
Memang diakui bahwa perbedaan keinginan dan kebutuhan begitu relative diantara satu manusia dengan manusia lain. Salah satu factor yang cukup menentukan dalam membedakan keduanya adalah menilai keduanya menggunakan perspektif kolektifitas (kebersamaan atau kejama’ahan). Dan inilah yang sebenarnya parameter umum yang harus digunakan dalam menilai sebuah kemanfaatan dari sesuatu termasuk mengidentifikasi perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Dengan kebersamaan kita dapat menilai seperti apa keadaan lingkungan manusia di sekitar kita, sehingga dengan

³ Meskipun kata kemauan ini juga kurang tepat untuk menggambarkan *desire*.

sangat mudah kita dapat menentukan apakah tindakan kita itu mencerminkan kebutuhan atau keinginan.

Namun perlu juga diingat bahwa konsep keperluan dasar dalam Islam ini sifatnya tidak statis, artinya keperluan dasar pelaku ekonomi bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Sehingga dapat saja pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang yang dulu lebih dikonsumsi akibat motifasi keinginan, pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut telah menjadi kebutuhan. Jadi parameter yang membedakan definisi kebutuhan dan keinginan ini (sekali lagi) tidak statis, ia bergantung pada kondisi perekonomian serta ukuran kemashlahatan. Dengan standar kamashlahatan konsumsi barang tertentu dapat saja dinilai kurang berkenan ketika sebagian besar ummat atau masyarakat dalam keadaan susah.

Gambar 4.1.
Kebutuhan, Keinginan dan Faktor Produksi



Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa perilaku ekonomi Islam tidak didominasi oleh nilai alamiah yang dimiliki oleh setiap individu manusia, ada nilai diluar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka. Dan nilai tersebut adalah Islam itu sendiri, yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi berkaitan dengan variabel keinginan dan kebutuhan ini, Islam sebenarnya cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi sama dengan kebutuhannya. Dengan

segala nilai dan norma yang ada dalam akidah dan akhlak Islam peleburan atau asimilasi keinginan dan kebutuhan dimungkinkan untuk terjadi.

Peleburan keinginan dengan kebutuhan dalam diri manusia Islam terjadi melalui pemahaman dan pengamalan akidah dan akhlak yang baik (*Islamic norms*). Sehingga ketika asimilasi itu terjadi, maka terbentuklah pribadi-pribadi muslim (*homo-islamicus*) yang kemudian menentukan perilaku ekonominya yang orisinal yang bersumber dari Islam. Dan secara simultan otomatis ekonomi tentu akan mengkristal menjadi sistem yang jelas berbeda dengan sistem ekonomi yang telah eksis saat ini.

Konsumsi Dan Permintaan

1. Konsumsi

Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk menumpukkan pahala menuju *falah* (kebahagiaan dunia dan akherat). Dalam perilaku konsumsipun tak terlepas dari perspektif tersebut. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah *mashlahah (public interest or general human good)*⁴, kebutuhan dan kewajiban. Meskipun secara alami motif dan tujuan berkonsumsi (atau aktifitas ekonomi pada umumnya) dari seorang individu adalah untuk mempertahankan hidupnya. Pada konteks ini Islam dan konvensional sepakat, bahwa kebutuhan untuk mempertahankan hidup menjadi motif umum ekonomi. Namun yang kemudian yang menjadi pembahasan perilaku ekonomi termasuk aktifitas ekonomi secara keseluruhan, sistem dan institusinya adalah segala hal yang berkaitan dengan preferensi dan kemampuan ekonomi serta ideologi yang menjadi pedoman berekonomi.

Sementara itu Yusuf Qardhawi⁵ menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi, diantaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilakekikiran.

Jadi dapat saja disimpulkan bahwa aktivitas konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akherat (*falah*). Baik ia membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal shaleh bagi manusia selain dirinya, aktivitas berkonsumsi seseorang tetap bertujuan untuk menumpukkan *credit point* dari Allah SWT.

⁴ Mashlahah secara bahasa berarti kebergunaan (*utility*) atau kesejahteraan (*welfare*), yang oleh Abu Hamid Al Ghazali (505 H/1111 M) dan Abu Ishaq Al Shatibi (790 H/1388 M) masalah (*plural of Mashlahah*) dibagi menjadi tiga kategori; esensial (*essential/daruriyah*), pelengkap (*complementary/hajiyah*) dan keinginan (*desirable/tahsiniyah*). Dan tugas negaralah yang memastikan kemashlahatan kategori pertama dari masyarakat itu terpenuhi dengan baik. Lihat Muhammad Akram Khan, "The Role of Government in the Economy," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 14, No. 2, 1997, p. 157.

⁵ Yusuf Qardhawi, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam," Rabbani Press, Jakarta (1995).

Sedangkan pada perspektif konvensional, aktivitas konsumsi seseorang sangat erat kaitannya dengan pemaksimalan kepuasan (*utility*). Sir John R. Hicks⁶ memberikan penjelasan tentang konsumsi ini menggunakan parameter kepuasan melalui konsep kepuasan (*utility*) yang tergambar dalam kurva *indifference* (tingkat kepuasan yang sama). Hicks mengungkapkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat pendapatannya (*income* sebagai *budget constraint*).

Konsumsi merupakan alat dalam memaksimalkan pencapaian falah tadi. Apa parameternya? Monzer Kahf (1992)⁷ memperkenalkan *Final Spending (FS)* sebagai variable standard dalam melihat kepuasan maximum yang diperoleh seorang konsumen muslim. Kahf mengikutkan variable Zakat sebagai variable yang menjadi keharusan dalam sistem perekonomian Islam. Kahf berasumsi bahwa zakat merupakan sebuah keharusan dari para muzakki (golongan yang hartanya mencapai nisab, sehingga wajib membayar zakat). Dengan demikian zakat tidak termasuk dalam *final spending*. *Final spending* bagi seorang individu muslim dalam analisa dua periode menurut Kahf adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} FS &= (Y-S) + (S-Sz) \\ FS &= (Y - sY) + (sY - zsY), \text{ atau;} \\ FS &= Y(1 - zs) \end{aligned}$$

Dimana; FS adalah final spending, Y adalah pendapatan, S adalah total tabungan, s adalah persentase Y yang di tabung dan z adalah persentase zakat. Terlihat bagaimana korelasi negatif yang ada antara s dan FS, semakin tinggi s semakin kecil FS. Sehingga didapatkan maksimum kepuasannya berdasarkan jumlah pendapatan dan tingkat kekayaan:

$$\begin{aligned} \text{Max } U &= U (FS, s) \\ \text{Subject to: } &FS + S = Y \text{ dan } DW = S \geq z (W + S) \end{aligned}$$

Dimana U adalah kepuasan konsumen, W adalah kekayaan konsumen dan D adalah turunan waktu (time derivative). Model di atas merupakan gambaran yang ada pada golongan pembayar zakat (muzakki), terlihat dari korelasi negatif antara zakat dengan *final spending*-nya. Bagaimana dengan golongan mustahik dan golongan yang belum mencapai nisab?

Berdasarkan kemampuan ekonominya. masyarakat dapat kita kelompokkan menjadi tiga golongan; pertama, golongan masyarakat mustahik yaitu golongan penerima zakat. Kedua, golongan masyarakat muzakki yaitu golongan pembayar zakat. Ketiga, golongan masyarakat non-mustahik-muzakki yaitu golongan yang bukan penerima ataupun pembayar zakat (kita sebut saja sebagai golongan middle income).

⁶ Lihat Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, Rajawali Press Jakarta, 2002.

⁷ Monzer Kahf, "A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour In Islamic Society", Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif, Longman Malaysia (1992), pp. 90 – 112.

Golongan mustahik:

$$\begin{aligned} FS + S &= Y & S \text{ mustahik} &= 0 \text{ dan } Y = 0 \text{ atau } Y < Co, \text{ maka} \\ 1. FS &= Z & Z &= Co \text{ atau;} \\ 2. FS &= Y + Z & Y + Z &= Co \end{aligned}$$

Dimana Co sama dengan konsumsi kebutuhan pokok, Y sama dengan pendapatan (*income*), Z sama dengan zakat yang diterima. Pada model konsumsi pertama terlihat bahwa konsumsi sepenuhnya bersumber dari zakat. Hal ini menjelaskan sumber konsumsi golongan mustahik khususnya kategori fakir, *ibnussabil* dan *fisabilillah*. Sedangkan model kedua menggambarkan sumber konsumsi mustahik kategori miskin, golongan yang memiliki pendapatan tapi tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga harus dipenuhi oleh zakat. Pada kondisi ini *final spending*-nya melebihi tingkat pendapatannya. Menurut Imam Ghazali distribusi zakat memang hendaknya sebesar kebutuhan para mustahik saja⁸. Maknanya zakat yang didistribusikan pada golongan mustahik ini sepenuhnya digunakan untuk mengkonsumsi kebutuhan primer (khususnya bagi empat kategori mustahik yang telah disebutkan). Jadi *final spending* mustahik sebesar kebutuhannya.

Golongan mid-income:

$$\begin{aligned} FS &= Y - S \\ FS &= Cm + In + Sh \end{aligned}$$

Dimana Cm sama dengan total konsumsi golongan mid-income, In sama dengan infak, Sh sama dengan shadaqah. Golongan mid-income ini dapat memenuhi kebutuhan primernya dan masih memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi barang sekunder. Meskipun begitu kekayaannya belum mencapai nisab. Sehingga untuk memaksimalkan *final spending*-nya golongan ini mengeuarkan infak atau shadaqah.

Golongan muzakki:

$$\begin{aligned} FS &= Y - S \\ FS &= Cz - (Zy + In + Sh + Wf) \end{aligned}$$

Dimana Cz sama dengan total konsumsi golongan muzakki, Zy sama dengan zakat pendapatan, Wf sama dengan wakaf. Pada model diatas diasumsikan bahwa zakat hanya bersumber dari pendapatan (tidak memperhitungkan zakat harta). Dapat di sebutkan bahwa golongan muzakki mampu mengeluarkan zakat, infak-shadaqah, serta memberikan wakaf. Meskipun zakat merupakan *spending* yang memberikan *falshah*, namun karena sifatnya yang tetap (*ibadah mahdhah*), maka kita asumsikan ia diluar dari *final spending*.

Sangat jelas terlihat bagaimana zakat memiliki peran yang bertolak belakang pada dua golongan masyarakat; mustahik dan muzakki. Zakat pada golongan mustahik

⁸ Imam Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Asy Syifa, Jilid 2 (1990).

menentukan tingkat konsumsinya, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan primernya dan dapat dikatakan *final spending*nya juga sebatas tingkat konsumsi kebutuhan primer tersebut. Sedangkan pada golongan muzakki, zakat akan mengurangi *final spending*-nya. Sementara itu bagi golongan mid-income, zakat tidak mempunyai pengaruh pada *final spending*-nya.

Menggunakan konsep konsumsi agregat yang selama ini dikenal dalam ekonomi mainstream (konvensional) terlepas dari konsep *final spending*, mungkin penggambaran perilaku konsumsi Islam menjadi sebagai berikut:

$$C = C_o + bY_d$$

Dimana:

b = preferensi konsumsi dari pendapatan (*marginal propensity to consume*)

Y_d = pendapatan yang dapat dibelanjakan (*disposable income*)

Dari model diatas, dapat diidentifikasi dua jenis konsumsi berdasarkan jenis golongan masyarakat dalam mekanisme zakat, yaitu konsumsi golongan mustahik (golongan masyarakat yang berhak menerima zakat) dan konsumsi golongan muzakki (golongan masyarakat yang wajib membayar zakat).

Konsumsi mustahik: $C = Z = C_o$

Konsumsi muzakki: $C = C_o + b(Y - Z)$ atau $C = C_o + b(Y - Z - Nw)$ ⁹

Nw = Nawaib (semacam pajak bagi para orang kaya yang bersifat temporer)¹⁰

Nw dikenakan kepada golongan masyarakat kaya (muzakki) karena perekonomian memburuk, dimana pendapatan pemerintah lainnya tidak mencukupi

Dengan pertimbangan bahwa golongan mustahik atau muzakki dapat saja berasal dari golongan non-muslim dan perkembangan perekonomian tidak begitu baik, maka variasi model konsumsi diatas dapat menjadi sebagai berikut:

Konsumsi mustahik muslim/non muslim: $C = Z_a = C_o$

Dimana:

$Z_a = Z + Kh + Jz$ atau $Z_a = Z + Kh + Jz + Nw$

Kh = Kharaj (semacam zakat pertanian bagi non muslim)

Jz = Jizyah (semacam zakat penghasilan/harta bagi non muslim)

Sementara itu konsumsi “muzakki” non muslim: $C = C_o + b(Y - Kh - Jz - Nw)$

⁹ Dalam persamaan ini tidak dimasukkan pajak dengan asumsi bahwa pajak yang dikenal dalam Islam adalah pajak-pajak yang memiliki ketentuannya secara syariat seperti zakat, kharaj, jizyah, ushr, nawaib dan lain sebagainya. Secara detil pembahasan instrument – instrument ini akan dijelaskan dalam pembahasan kebijakan fiscal.

¹⁰ Variabel-variabel ini akan dijelaskan secara detil pada bab-bab selanjutnya.

Dari model konsumsi mustahik dan muzakki diketahui bahwa MPC mustahik lebih besar dari MPC muzakki. Hal ini disebabkan oleh sensitifitas konsumsi mustahik lebih besar akibat kenaikan pendapatan mereka dibandingkan dengan muzakki. Dari perspektif lain ini dijelaskan oleh alasan bahwa distribusi dana zakat (termasuk kharaj, jizyah dan nawaib) bagi mustahik jumlahnya harus sama dengan kebutuhan pokok mereka, sehingga secara sempurna pendapatan mereka dari dana tersebut secara sempurna (MPC mustahik cenderung sama dengan 1). Sementara besarnya MPC muzakki cenderung berada diantara 0 dan 1. Hal ini karena kebutuhan pokok mereka relatif telah terpenuhi. Dengan pemahaman ini sebenarnya dari model konsumsi muzakki, variabel “bYd” merepresentasikan kebutuhan sekunder, tersier atau bahkan luxury dari muzakki. Dengan demikian – menggunakan pemahaman ini – dapat saja dikatakan bahwa semakin beriman seorang individu atau sekelompok orang maka MPC individu atau kolektif akan semakin kecil mendekati 0, karena seorang yang beriman akan lebih fokus memenuhi kebutuhan pokok mereka saja. Namun jika MPC juga berarti segala preferensi konsumsi muzakki termasuk konsumsi untuk individu lain (motif beramal shaleh), maka mungkin sebaiknya MPC muzakki dibedakan menjadi 2 yaitu MPC untuk konsumsi diri sendiri (MPC riil) dan MPC untuk orang lain seperti infak - shadaqah (MPC amal shaleh). Dengan begitu MPC dapat dituliskan menjadi:

$$\text{MPCmuzakki} = \text{MPCriil} + \text{MPCamal shaleh}$$

Kadar keimanan seorang muzakki akan cenderung membentuk komposisi besar MPC-nya menjadi MPC riil < MPC amal shaleh. Atau dengan kata lain, semakin beriman seseorang (muzakki), maka MPC-nya akan didominasi oleh perilaku amal shaleh yang digambarkan oleh dominasi MPC amal shalehnya. Memasukkan amal shaleh dalam model konsumsi muzakki, maka secara spesifik model konsumsi muzakki menjadi sebagai berikut:

$$C = C_0 + b Y_d$$

Jika $b = \text{MPCmuzakki}$; $c = \text{MPCriil}$; $d = \text{MPCamal shaleh}$; maka

$$C = C_0 + (c + d) Y_d$$

$$C = C_0 + cY_d + dY_d$$

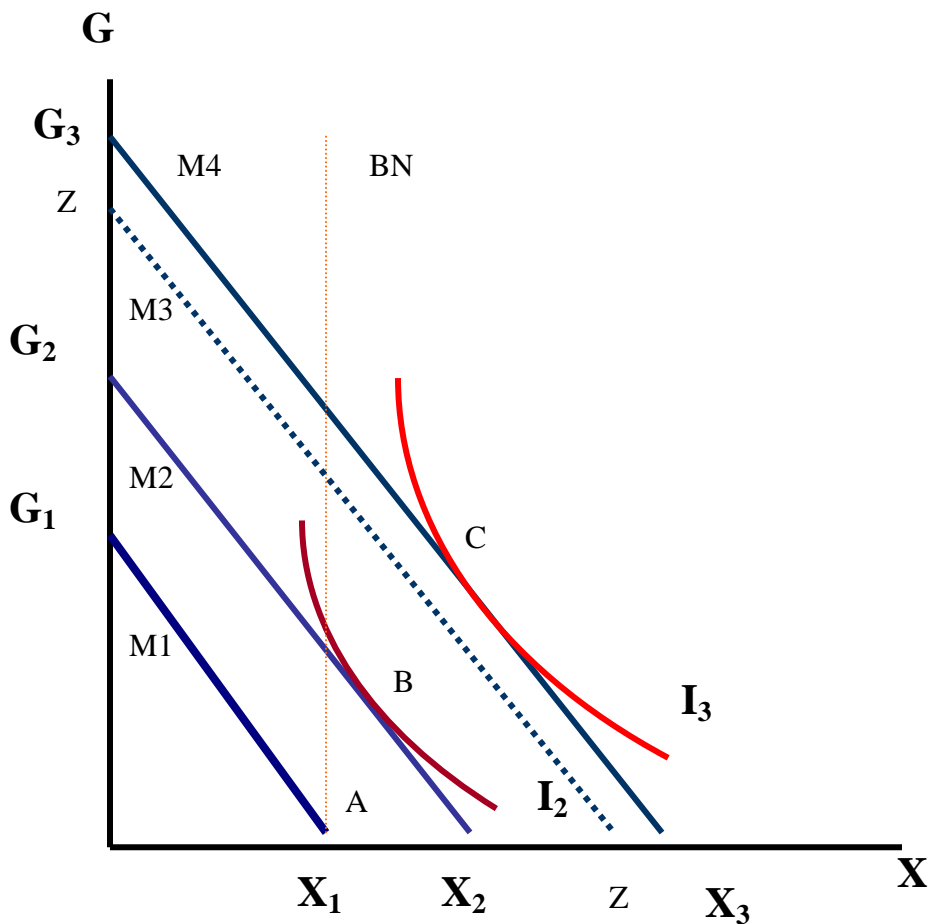
Model konsumsi muzakki diatas menunjukkan tiga komponen atau motif utama konsumsi seorang atau sekelompok muzakki, yaitu motif konsumsi kebutuhan pokok (C_0), kebutuhan sekunder/tersier/luxury (cY_d) dan kebutuhan untuk beramal shaleh (dY_d).

Dari analisa ini terlihat bagaimana faktor keimanan mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang khususnya muzakki. Sementara itu analisa yang sama tidak dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh keimanan terhadap perilaku konsumsi mustahik, karena asumsi mustahik tidak dapat beramal shaleh menggunakan pendapatannya yang bersumber dari zakat. Hal ini sekali lagi menunjukkan kesesuaian potensi perilaku manusia muzakki untuk dapat memaksimalkan diri beramal shaleh dengan anjuran Rasulullah SAW agar semua manusia berusaha untuk memperbaiki kondisi

perekonomiannya, sehingga dapat memaksimalkan kemanfaatan dirinya bagi orang lain. Argumentasi ini tentu saja berasumsi bahwa besarnya amal shaleh dilakukan berdasarkan besarnya sumber daya ekonomi/harta/pendapatan yang dimiliki seseorang, sehingga kemudian disimpulkan bahwa kemampuan beramal shaleh muzakki lebih besar dari kemampuan beramal shaleh mustahik.

Dari landasan berfikir tentang perilaku konsumsi yang tidak hanya mengakomodasi konsumsi kebutuhan – kebutuhan untuk diri sendiri tetapi juga memperhitungkan perilaku konsumsi untuk orang lain atau tindakan-tindakan social (amal shaleh) – yang dilakukan dengan menggunakan pendapatan – maka penggambaran tingkat kepuasan (*utility*)¹¹ bagi konsumsi dalam perspektif Islam mungkin dapat digambarkan oleh kurva 1.

Kurva 4.1.
Utility of Islamic Consumers



¹¹ Hal ini tidak sama dengan konsep *utility*-nya konvensional. Dalam Islam definisi *utility* ini lebih diterjemahkan dalam kerangka konsep kemashlahatan (lihat Akram Khan (1992), dimana kepuasan diukur atas dasar manfaat dunia dan akherat, serta lebih pada manfaat social (kolektif) dibandingkan manfaat pribadi.

Dalam kurva ini diasumsikan bahwa amal shaleh bersumber dari penggunaan pendapatan (*income*). Kurva ini memiliki *budget constrain* sebagai berikut:

$$M = P_x Q_x + P_g Q_g$$

Dimana M sama dengan *income* (pendapatan), Q_x sama dengan barang-jasa x , P_x sama dengan harga Q_x . Q_g sama dengan *good deeds* g , P_g sama dengan harga Q_g , BN sama dengan jumlah kebutuhan pokok. Pada golongan mustahik model tersebut dapat dituliskan seperti model di bawah ini.

$$Z = P_x Q_x$$

Dimana Z adalah *income* para mustahik. Sehingga *budget constrain* mereka juga menunjukkan tingkat kebutuhan minimal hidup para mustahik.

Kurva 1 memperlihatkan tingkat kepuasan masing-masing golongan masyarakat; mustahik, mid-income dan muzakki. Variable X dan G merupakan kombinasi dari barang-jasa dan *good deeds*. Namun khusus untuk golongan mustahik X dan G merupakan dua barang-jasa kebutuhan primer yang menjadi pilihannya, yang kombinasinya akan memberikan kepuasan maksimal. Terlihat bahwa $X_1 G_1$, $X_2 G_2$ dan $X_3 G_3$ merupakan *budget constrain* dari mustahik, *mid-income* dan muzakki, yang menunjukkan pencapaian kepuasan (*utility*) semakin meningkat, ditunjukkan oleh kurva *indifference* I_2 dan I_3 . Sedangkan garis ZZ merupakan garis yang merepresentasikan batas nisbah dari *income* yang diterima muzakki (dengan asumsi bahwa ada pemberlakuan zakat profesi yang menggunakan parameter tingkat *income* tertentu). Dan garis BN menggambarkan tingkat kebutuhan dasar dari masyarakat.

Maka dapat disimpulkan secara umum bahwa kepuasan maksimum dari *utility* ini adalah:

$$U_{max} = U(X, G)$$

Artinya kepuasan diasumsikan dapat diperoleh dengan mengkonsumsi barang X dan atau melakukan *good deeds* menggunakan pendapatan yang diperolehnya. Menggunakan kurva kepuasan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan selalu berusaha mencapai kepuasan pada tingkat di atas garis kebutuhan dasar (BN). Atau pada titik perpotongan BN dengan garis *budget constrain*-nya, artinya mereka akan mengkonsumsi barang pada jumlah yang sama dengan kebutuhan dasar dengan kompensasi meningkatkan jumlah amal shaleh (*good deeds*).

Sedangkan khusus untuk golongan mustahik (dengan asumsi yang ada), kepuasan maksimum mereka terbatas oleh variable barang X , karena memang mereka tidak memiliki akses pada ekonomi pada tingkat minimum sehingga mereka tidak memiliki pendapatan untuk melakukan amal shaleh, atau dapat dituliskan:

$$U_{max} = U(X)$$

Kurva diatas juga memperlihatkan bagaimana golongan mustahik secara maksimal kepuasannya ada pada titik A, yaitu sebesar kebutuhan pokok atau dasar yang didapatnya. Boleh jadi pendapatan mereka tidak cukup atau bahkan tidak ada untuk memperoleh kebutuhan dasar, tapi dengan mekanisme zakat maka pendapatannya akan terdorong hingga garis X_1G_1 . Sementara kepuasan golongan *mid-income* cenderung akan berada pada posisi titik B, dan kepuasan golongan muzakki akan lebih tinggi yaitu pada posisi titik C.

Jadi sangat logis sekali anjuran Islam kepada para pemeluknya agar berada dalam kondisi berkecukupan (muzakki), karena kondisi tersebut bukan hanya menghilangkan hambatan ekonomi bagi kaum muslimin untuk tetap berada dalam kondisi keimanan, tapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk dapat beramal shaleh lebih banyak. Dari kurva diatas ditunjukkan bagaimana golongan mustahik tidak mampu melakukan amal shaleh karena tidak memiliki pendapatan lebih, sedangkan golongan *mid-income* masih mampu menyisihkan pendapatannya untuk beramal misalnya dengan mengeluarkan infaq atau shadaqah, tapi golongan ini belum dapat mencapai amal shaleh lebih tinggi seperti zakat dan wakaf. Sementara golongan muzakki karena pendapatannya mencapai batas nisab zakat mereka mampu beramal shaleh dalam bentuk zakat, dan bahkan ketika pendapatannya lebih besar lagi muzakki akan terdorong untuk beramal shaleh lebih tinggi lagi yaitu memberikan wakaf.

Model kepuasan ini pada hakekatnya sama dengan model kepuasan yang dijabarkan oleh Monzer Kahf, namun lebih didetilkkan pada tiga golongan konsumen dalam masyarakat berdasarkan kemampuan ekonominya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan akan diperoleh lebih besar ketika masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik. Mungkin akan terlihat sama dengan konsep konvensional pada kesimpulan ini, tapi unsure amal shaleh yang menjadi parameter dalam mengukur kepuasan menjadi pembeda antara model Islam dengan konvensional.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Timur Kuran (2002) dalam sebuah artikelnya membahas peran dan fungsi zakat ini secara kritis. Kuran berpendapat bahwa data sejarah menunjukkan bahwa zakat lebih berperan sebagai alat politik dari pada alat ekonomi, sebab zakat lebih efektif menjaga kestabilan politik dibandingkan alat peningkat produktivitas dalam sebuah bangunan ekonomi. Namun oleh Monzer Kahf (1992)¹² kecenderungan fungsi zakat tersebut dapat dibantah (lihat bahasan perilaku konsumsi dari Monzer Kahf di atas). Kahf mengatakan bahwa melalui golongan masyarakat penerima (mustahik) dan pembayar (muzakki), zakat memiliki peran dalam mendorong kinerja ekonomi. Menurut Kahf, zakat yang diterima oleh mustahik akan meningkatkan konsumsinya yang tentu kemudian meningkatkan agregat permintaan secara makro. Sementara itu pada pihak muzakki, zakat akan meningkatkan rasio simpanan mereka, dengan asumsi bahwa tiap individu akan mempertahankan tingkat kekayaannya. Jadi peningkatan rasio tabungan, menurut Kahf merupakan kompensasi dari pembayaran zakat. Dan peningkatan rasio tabungan ini memiliki hubungan yang erat dalam peningkatan investasi dari muzakki. Peningkatan output akibat naiknya tingkat konsumsi

¹² Monzer Kahf, *op. cit.*, p. 101.

mustahik membuat muzakki melakukan (keputusan) investasi. Sehingga pada saat yang sama akan meningkatkan permintaan agregat.

Pendapat Kahf ini didukung oleh Metwally (1992) yang menunjukkan bagaimana perilaku produksi Islam sebuah perusahaan akan menghadapi kurva permintaan yang lebih besar (tinggi) dibandingkan dengan perusahaan konvensional. Bahasan ini kita akan diskusikan pada subtopik perilaku produksi nanti. Metwally juga berpendapat bahwa Zakat akan meningkatkan *marginal propensity to consume* (MPC), atau keinginan menyisihkan dari pendapatan konsumen untuk dibelanjakan. Tapi oleh beberapa pakar pendapat ini dikritisi, karena pola konsumsi dalam Islam relatif memperlihatkan kecenderungan berhemat, sehingga yang meningkat bukanlah MPC tapi lebih pada *autonomous consumption* (Co). Artinya zakat meningkatkan jumlah konsumen dengan variabel Co sebagai indikator. Dan variabel Co merepresentasikan tingkat konsumsi untuk kebutuhan pokok atau dasar.

Perbedaan yang cukup jelas antara perilaku konsumsi Islam dan konvensional terletak pada motif konsumsi dan batasan-batasan hukum yang ada dalam sistem ekonomi. Perilaku konsumsi Islam lebih didominasi nilai-nilai moral Islam seperti berkonsumsi berdasarkan kebutuhan, tidak bermewah-mewah dan pertimbangan sosial kemasyarakatan (kemashlahatan bagi lingkungan umumnya) seperti yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya tentang cara menyikapi harta. Prinsip-prinsip Islam yang menjamin kebutuhan primer masyarakatnya melalui mekanisme zakat menjadi suatu karakter khas dari perilaku konsumsi masyarakat Islam. Konvensional tidak memiliki ketentuan dan instrumen seperti ini. Sistem pajak yang ada dalam sistem konvensional sejauh ini cenderung tidak efektif, dan bahkan lebih menguntungkan segelintir golongan masyarakat saja.

2. Permintaan

Teori permintaan merupakan teori dasar yang sudah secara luas disepakati, baik itu secara konvensional maupun secara Islam. Ibnu Taimiyah termasuk pakar klasik Islam yang cukup mendalam pada pembahasan perilaku ekonomi. Beliau mengungkapkan teori permintaan dan penawaran secara detil berikut pembahasan tentang uang, harga, inflasi dan pengaruh pertumbuhan populasi terhadap permintaan dan penawaran.

Hukum permintaan yang diakui secara luas mengatakan bahwa jika harga suatu komoditi naik, dan hal-hal lain dianggap tidak berubah (*ceteris paribus*), pembeli cenderung membeli lebih sedikit komoditi tersebut (permintaan turun). Demikian juga halnya jika harga turun, dan hal-hal lain tidak berubah, jumlah barang yang dibeli akan meningkat (permintaan naik).¹³ Dengan kata lain permintaan suatu barang memiliki hubungan atau korelasi negatif dengan harga barang tersebut. Lihat kurva.

$$Q_d = q - r(P)$$

¹³ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Microeconomics* (Terjemahan), Fourteen Edition, McGraw-Hill, Erlangga Jakarta, 1992, pp. 61.

Dimana:

Q_d = Jumlah barang/jasa

q = Konstanta (permintaan yang tidak dipengaruhi tingkat harga)

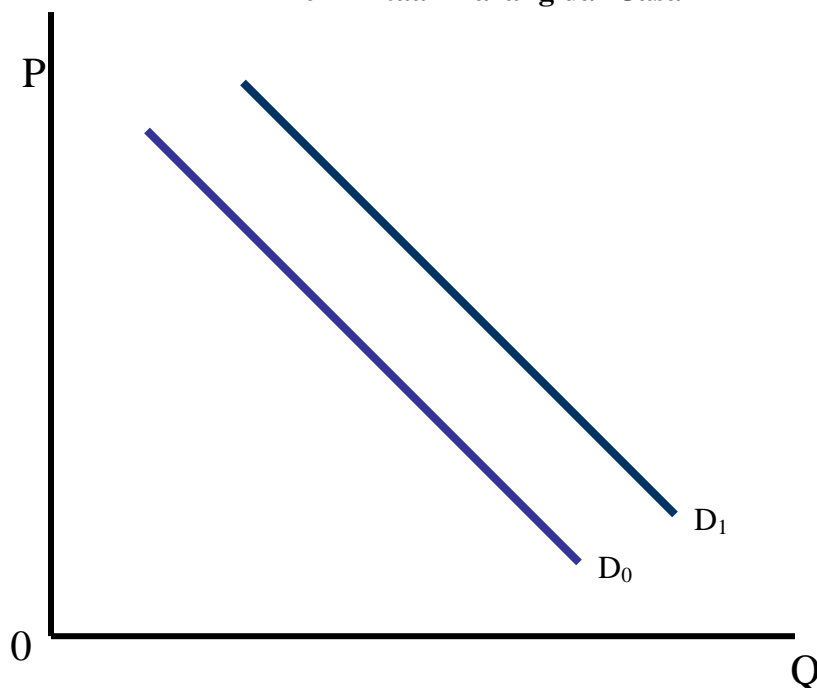
r = Sensitivitas permintaan akibat perubahan harga

P = Harga barang/jasa

Penjelasan dari teori ini yang kemudian menunjukkan perbedaan antara konvensional dan Islam. Dalam konvensional terlihat dengan sangat jelas bahwa teori permintaannya tidak mengakomodasi individu yang tidak memiliki daya beli, sehingga kurva permintaannya lebih merepresentasikan preferensi konsumen yang memiliki daya beli saja. Sementara Islam menjelaskan teori permintaan dengan mengakomodasi individu yang tidak memiliki kemampuan beli. Karena sistem akan memberikan akses bagi individu tersebut untuk dapat memiliki kemampuan beli, sehingga kurva permintaan akan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan asumsi bahwa masyarakat berkembang menuju kondisi keimanan individu dan kolektif yang baik, maka sedapat mungkin tingkat konsumsi merepresentasikan tingkat permintaan yang juga mencerminkan tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, dalam teori permintaan, tingkat permintaan merupakan juga tingkat kebutuhan masyarakat. Jadi tingkat permintaan bukan hanya melambangkan tingkat daya beli atau kemampuan beli dari masyarakat seperti yang ada dalam paradigma konvensional, karena boleh jadi ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang kemampuan belinya dibawah harga pasar berdasarkan *income* yang dimiliki, sehingga mekanisme penjaminan kebutuhan minimal oleh negara (*takaful*) melalui instrumen zakat menjadi alat (instrumen awal) untuk meningkatkan daya beli mereka.

Kurva 4.2.
Permintaan Barang dan Jasa



Dengan demikian kurva permintaan (kurva 4.2) dalam ekonomi Islam (D1) akan berbentuk sama dengan konvensional namun cenderung lebih besar atau tinggi dari pada kurva permintaan konvensional (Do). Hal ini terjadi akibat akomodasi konsumen yang lebih besar di pasar Islam, sementara pasar konvensional hanyalah menggambarkan konsumen yang dapat mencapai harga pasar. Disamping itu, dengan landasan teori seperti yang dijelaskan sebelumnya, karakteristik barang dan jasa yang kemudian beredar atau ditransaksikan di pasar adalah barang dan jasa yang cenderung bersifat kebutuhan. Namun perlu diingat bahwa warna kebutuhan ini tidak berarti barang dan jasa yang ditransaksikan adalah barang dan jasa yang kita nilai kebutuhan primer pada saat ini yaitu makanan, pakaian dan rumah. Definisi kebutuhan disini tidak bermakna statis tapi dinamis, dimana barang dan jasa yang disebut kebutuhan tergantung pada kondisi atau perkembangan ekonomi pada satu waktu tertentu (lebih detail hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan kebutuhan versus keinginan).

Produksi Dan Penawaran

1. Produksi

Produksi dalam Islam bermotif sama dengan konsumsi, yaitu kemashlatan, kebutuhan dan kewajiban. Prilaku produksi pada dasarnya merupakan usaha dari seseorang atau beberapa orang untuk lepas dari kefakiran. Di samping itu, menurut Yusuf Qardhawi (1995), secara eksternal produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan membangun kemandirian umat.¹⁴ Qardhawi menambahkan bahwa nilai moral yang menjadi motif prilaku adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya (flora-fauna dan alam sekitar), professional (amanah & itqan) dan berusaha pada sesuatu yang halal. Khususnya pada prilaku produksi dari sebuah perusahaan, M.M. Metwally (1992)¹⁵ menambahkan asumsi-asumsi produksi Islam, diantaranya, produksi dilakukan untuk barang halal, proses manajemen yang juga halal (tidak dikelola atas sesuatu yang diharamkan) dan tidak melakukan strategi pemasaran yang memberikan kemudharatan kepada umat.

Dengan demikian masalah barang apa yang harus diproduksi (*what*), berapa jumlahnya (*how much*), bagaimana memproduksi (*how*), untuk siapa produksi tersebut (*for whom*), yang merupakan pertanyaan umum dalam teori produksi tentu saja merujuk pada motifasi-motifasi Islam (syariah) yang telah dijelaskan.

Dalam Islam siapa saja diberikan kebebasan dalam melakukan usaha produksi, bahkan data sejarah menunjukkan bagaimana negara Islam menjadi fasilitator yang cukup baik bagi para pelaku pasar yang ingin aktif di pasar. Di Turkey pada zaman salafusshaleh terdapat pasar yang sangat besar dimana para pengusaha, pedagang, petani atau siapa saja

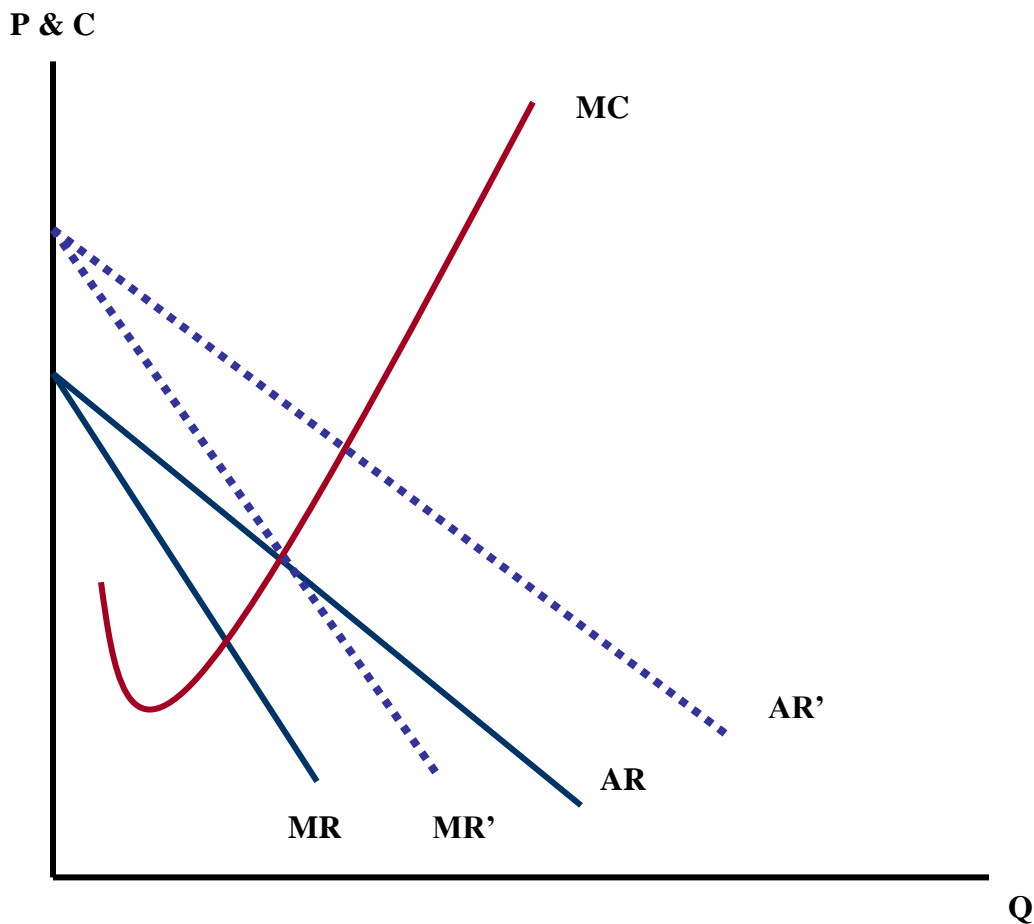
¹⁴ Yusuf Qardhawi, *op. cit.* pp.180-189.

¹⁵ M.M. Metwally, "A Behavioural Model of An Islamic Firm," *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*, Longman Malaysia (1992), pp. 131-138.

yang ingin ikut andil meramaikan pasar memperoleh kemudahan berupa fasilitas penginapan.

Dalam Islam menurut Muhammad Abdul Mannan (1992)¹⁶, berdasarkan pertimbangan kemashlahatan (*altruistic considerations*) perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar (*given demand conditions*). Karena kurva permintaan pasar tidak cukup memberikan data untuk sebuah perusahaan mengambil keputusan. Dalam sistem konvensional, perusahaan diberikan kebebasan untuk memproduksi, namun cenderung lebih terkonsentrasi pada output yang memang menjadi permintaan pasar (*effective demand*), dimana kebutuhan riil dari masyarakat tidak dapat begitu saja mempengaruhi prioritas produksi sebuah perusahaan.

Kurva 4.3.
Produksi dalam Pasar Monopoli



Memang dalam Islam orientasi keuntungan juga menjadi salah satu tujuan dari aktivitas produksi, namun rambu-rambu syariah membuat corak perilaku produksi tidak seperti apa

¹⁶ M.A. Mannan, "The Behaviour of The Firm and Its Objective in an Islamic Framework", Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif, Longman Malaysia (1992), pp. 120-130.

yang dibangun sistem konvensional. Prilaku produksi yang ada pada konvensional terfokus pada pemaksimalan keuntungan (profit oriented). Boleh saja pada suatu kondisi (pada satu pilihan output dengan konsekuensi harga tertentu) oleh konvensional dinilai tidak optimal, tapi berdasarkan nilai kemashlahatan baik bagi perusahaan maupun lingkungannya (pertimbangan kebutuhan masyarakat, kemandirian negara dll), hal ini dapat saja di katakan optimal.

Menurut Mannan, keseimbangan output pada sebuah perusahaan Islam hendaknya lebih luas dibandingkan perusahaan konvensional, sebagai perwujudan perhatian perusahaan terhadap kondisi pasar. Pendapat ini didukung oleh M.M. Metwally (1992)¹⁷, ia berpendapat bahwa fungsi kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh variable tingkat keuntungan (*level of profits*) tapi juga oleh variable pengeluaran yang bersifat *charity* atau *good deeds*. Sehingga fungsi utilitas dari pengusaha muslim adalah sebagai berikut:

$$U_{max} = U(F, G)$$

Dimana: $F = \text{level of profits}$
 $G = \text{good deeds}$

Dengan mengasumsikan M sebagai tingkat keuntungan (*the level of actual profit*), maka:

$$M = R - C - G$$

Dimana: $R = \text{total revenue} = \text{harga (p)} \times \text{kuantitas produk (q)}$
 $C = \text{total cost} = C(q)$

Menurut Metwally, dengan asumsi bahwa *good deeds* berupa *charity* akan meningkatkan permintaan produk dari perusahaan, pada kondisi $MR = MC$ dengan struktur biaya yang sama, perusahaan Islam akan memiliki keseimbangan output dan keseimbangan harga yang lebih tinggi dari pada *non-Islamic firm*.¹⁸ Karena berasumsi bahwa perubahan harga akibat perubahan *good deeds* (G) positif ($\partial p / \partial G > 0$). Hal ini juga merupakan respon produksi dari peningkatan *demand* akibat kenaikan kemampuan beli masyarakat yang bersumber dari G. Jadi AR akan naik karena harga (P) yang meningkat disebabkan pertambahan zakat (G).

Menurut Metwally karena G memiliki pengaruh yang positif terhadap harga akibat permintaan (terutama dari gol mustahik) yang meningkat, maka *revenue* (R) pun akan meningkat. Terlihat pada kurva 4.3, bagaimana kondisi $MC=MR$ pada perusahaan Islam permintaannya ($\text{Demand} = AR'$) lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan konvensional (AR). Disamping itu, kelebihan perusahaan Islam adalah luasnya toleransi penentuan harga yang menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat hingga titik *break even point*, yaitu titik dimana perusahaan hanya sekedar dapat terus menjalankan usahanya tanpa ada keuntungan dan kemampuan ekspansi.

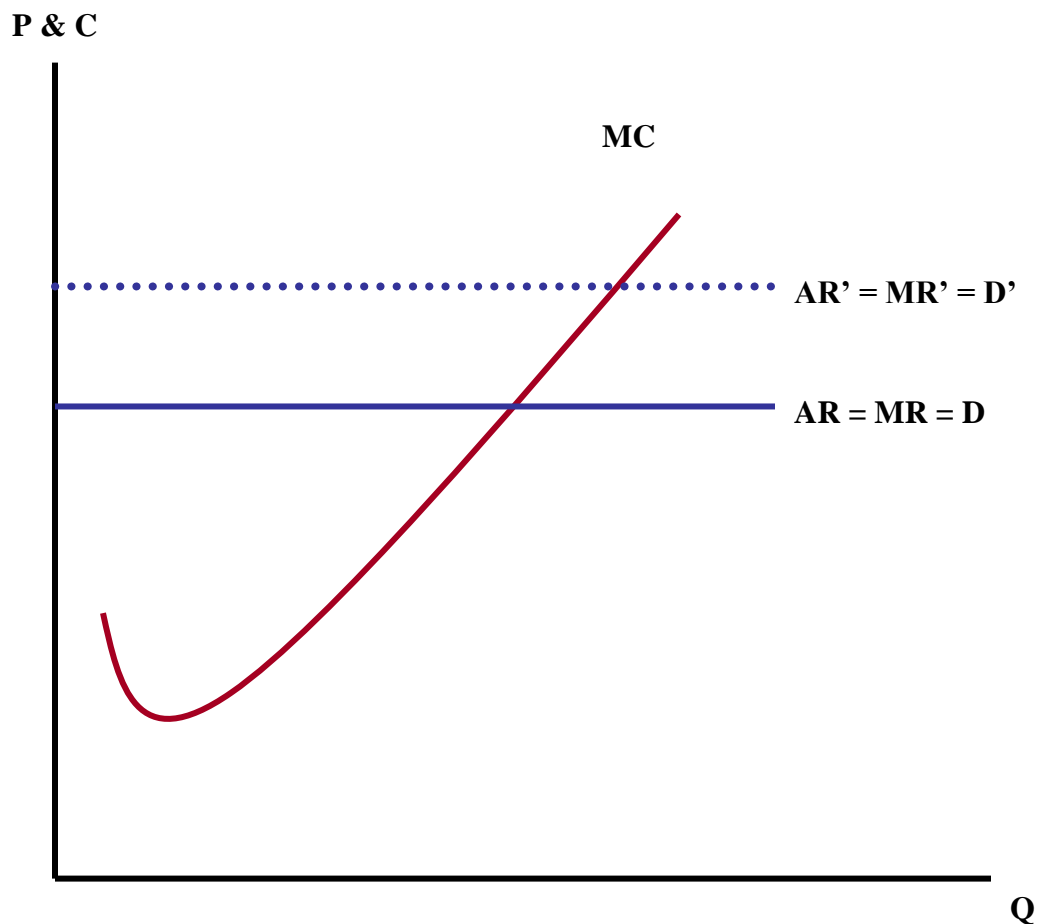
¹⁷ M.M. Metwally, *op.cit.* pp. 133-136.

¹⁸ *Ibid.*, pp. 135

Dari apa yang dijelaskan Metwally dengan menggunakan asumsi pasar monopoli, sebenarnya juga dapat menjelaskan bagaimana efek zakat terhadap pasar yang berada dalam kondisi kompetisi yang sempurna (*perfect competition market*), tentu saja dengan asumsi yang sama, yaitu bahwa zakat yang diambil dari para produsen (muzakki) digunakan oleh konsumen (mustahik) untuk memenuhi permintaan kebutuhan minimal mereka.

Besarnya pengaruh zakat sangat bergantung pada akumulasi zakat yang terkumpul yang kemudian didistribusikan. Efektifitas pengaruh zakat juga dapat diukur berdasarkan besar elastisitas fungsi biaya marjinal perusahaan. Elastisitas biaya marjinal perusahaan yang semakin elastik akan menunjukkan angka efektifitas zakat terhadap perusahaan semakin besar. Lihat kurva 4.4.

Kurva 4.4.
Produksi dalam Pasar Kompetisi Sempurna



Disamping toleransi yang berbentuk pemenuhan kebutuhan dan konsiderasi harga yang diterapkan perusahaan Islam terhadap kondisi pasar, sepatutnya perusahaan juga memberikan kontribusi riil pada lingkungannya yang dapat berbentuk zakat (wajib) dan infak-shadaqah (sukarela). Inilah yang coba di jelaskan oleh Metwally pada bahasan diatas. Secara makro, zakat pada hakikatnya menjaga sector produksi tetap berjalan melalui penjaminan tingkat konsumsi primer pada tingkat minimal. Sementara itu infak-shadaqah dan instrumen sejenisnya memungkinkan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik diatas garis minimum (mustahik).

Imam Ghazali memiliki pendapat yang cukup menarik dalam berperilaku konsumsi-produksi. Beliau berpendapat bahwa tujuan berekonomi adalah pencapaian posisi muzakki dengan berusaha mendapatkan harta sebanyak yang kita mampu, namun tetap royal dalam membelanjakannya di jalan Allah SWT dengan tetap menjaga posisi sebagai muzakki. Ini dilakukan dengan semangat hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Dengan kata lain perilaku konsumsi – produksi adalah perilaku yang bertujuan menjauhi posisi fakir, sesuai dengan peringatan Rasulullah SAW bahwa kefakiran mendekatkan manusia pada kekufuran.

Dalam sistem ekonomi Islam, salah satu tugas utama negara adalah menjamin tepenuhinya kebutuhan pokok (primer) dari masyarakat, khususnya masyarakat golongan mustahik. Sehingga permintaan (*demand*) akan barang dan jasa dalam pasar Islam lebih menggambarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekedar menggambarkan daya serap masyarakat yang terlihat dari kemampuan atau daya belinya seperti yang ada pada konvensional. Karena bagi yang tak mampu memenuhi kebutuhannya oleh negara (Islam) akan dipenuhi, atau dengan kata lain, daya belinya akan dibantu sampai tingkat kebutuhan primernya.

Pada hakikatnya zakat yang dibagikan kepada para mustahik sebenarnya mengubah potensi konsumsi (barang mewah) para muzakki menjadi konsumsi riil kebutuhan primer golongan mustahik. Ketika baitul mal negara tidak dapat memenuhi kebutuhan ini melalui zakat dan *fay*¹⁹, maka dipebolehkan negara mengambil pajak dari golongan kaya. Dengan demikian tingkat minimal konsumsi masyarakat ada pada tingkat konsumsi kebutuhan primernya. Di pasar harga tidak akan sampai menjulang atau menurun melebihi keadaan normal karena di samping negara menjaga tingkat permintaan dengan menjamin kebutuhan primer masyarakat, sisi produksipun dijaga agar lebih mengedepankan motif pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sisi produksi tidak menggiring masyarakat menjadi masyarakat konsumtif sesuai dengan landasan nilai yang terdapat pada sisi produksi.

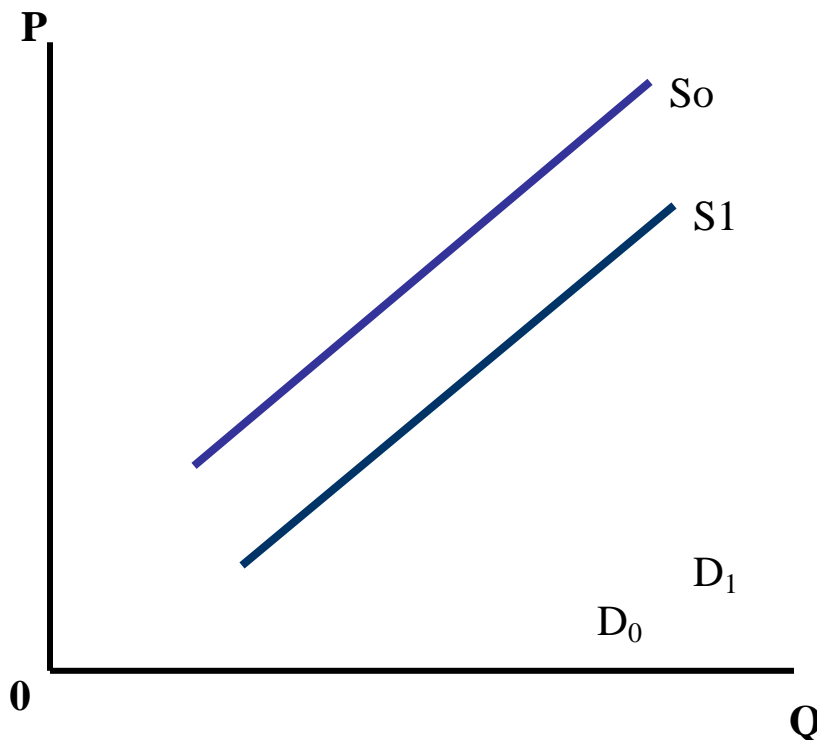
¹⁹ *Fay* adalah harta yang didapatkan oleh negara dari musuh tanpa harus melalui perang, *land revenue* dan semua *revenue* selain zakat. Lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: an Islamic Perspective*, The Islamic Foundation, 1996, p. 37.

Sementara itu Muhammad Nejatullah Siddiqi (1992)²⁰ berpendapat bahwa ekonomi modern menjadikan *profit maximization* menjadi norma dalam aktivitas bisnis. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat keuntungan sebuah perusahaan menjadi parameter status dan kekuatan perusahaan tersebut. Hal ini kemudian mengenyampingkan tingkat kontribusi perusahaan pada kesejahteraan masyarakat secara luas sebagai salah satu parameter fungsi dan peran perusahaan. Pencegahan ekses-ekses negatif yang ada dalam ekonomi konvensional lebih terfokus pada regulasi pasar, tidak dimulai dari nilai-nilai dasar (pondasi dasar dari motivasi) berdiri dan berkembangnya perusahaan tersebut. Hal inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional pada sisi produksi. Sama dengan sisi konsumsi, sisi produksi dari konvensional juga mengesampingkan fungsi perusahaan yang bersifat altruisme dari aktivitas ekonominya.

2. Penawaran

Penawaran merupakan akumulasi barang dan jasa yang ada dipasar yang pergerakannya dipengaruhi oleh harga. Sudah menjadi teori umum bahwa jumlah penawaran akan meningkat ketika harga di pasarpun meningkat, dan begitu sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah penawaran akan ikut menurun. Lihat kurva 4.5.

Kurva 4.5.
Penawaran



²⁰ M.N. Siddiqi, "Islamic Producer Behaviour," Readings in Microeconomics: An Islamic Perspektif, Longman Malaysia (1992), pp. 139-156.

Secara matematis, persamaan penawaran dapat dituliskan seperti di bawah ini:

$$Q_s = s + t(P)$$

Dimana:

Q_s = Jumlah barang/jasa

s = Konstanta

t = Sensitivitas penawaran akibat perubahan harga

P = Harga barang/jasa

Secara spesifik, untuk barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, jumlah penawarannya tentu akan memiliki batas minimum. Karena fungsi negara memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, sehingga negara harus berusaha agar jumlah penawaran tidak berada di bawah titik minimum, karena akan mengancam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Akibat negara juga akan memberikan akses bagi pelaku ekonomi yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa kebutuhan dasar, maka jumlah penawaran terhadap barang dan jasa kebutuhan dasar dalam Islam tentu akan relatif lebih besar dari penawaran konvensional. Atau setidaknya corak barang dan jasa yang ditransaksikan dalam pasar akan lebih diwarnai oleh kebutuhan dasar masyarakat. Produksi barang dan jasa oleh produsen atau yang diperjualbelikan oleh para pedagang tidak ditentukan oleh keinginan (nafsu) para pemilik kapital atau konsumen yang berlimpah sumber daya ekonomi. Dalam ekonomi Islam, dengan asumsi bahwa nilai moral dan ideologi Islam serta prinsip syariah diadopsi dengan sempurna, barang dan jasa yang beredar akan ditentukan oleh preferensi kemashlahatan yang berorientasi pada amal shaleh. Terlebih lagi warna kolektifitas yang merefleksikan nilai-nilai berjamaah dan ukhuwah akan semakin menegaskan corak penawaran barang dan jasa yang ada bukan untuk melayani keinginan-keinginan yang bersifat konsumtif.

Tapi tentu saja secara agregat penawaran dalam Islam tidak dapat dikatakan akan lebih besar dari konvensional. Perbedaan keduanya tidak terdapat pada jumlah, tapi lebih pada corak dan kecenderungan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Melihat karakteristik yang dibangun dalam produksi, maka corak barang dan jasa yang ada dalam penawaran pasar tentu juga akan merujuk pada kebutuhan dan kemashlahatan masyarakat luas. Wajar bahwa dari penawaran dalam pasar Islam akan terlihat perekonomian yang tidak memiliki kecenderungan kemewahan.

Distribusi

Dalam perekonomian modern saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sector distribusi merupakan sector yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Distribusi ini termasuk distribusi pendapatan dan distribusi kekayaan, baik yang sifatnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi maupun yang bersifat social (yang memang distribusi jenis ini begitu kental dalam perekonomian Islam).

Muhammad Anas Zarqa (1995)²¹ mengungkapkan ada beberapa factor yang menjadi dasar distribusi (atau redistribusi), yaitu tukar menukar (*exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem social dan nilai etika (*social sistem and ethical values*). Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah eksistensinya mekanisme zakat dalam ekonomi.

Islam begitu menjunjung tinggi hak individu atas kepemilikan terhadap sesuatu, namun karena mekanisme kepemilikan tersebut tidak dapat dilakukan oleh semua individu²², misalnya ketentuan yang menyebutkan orang yang berkuasa, berkeahlian atau sejenisnya akan mendapatkan “lebih” yang kemudian cenderung menghambat pemerataan kesejahteraan, maka diperlukan sistem yang menjamin terjadinya distribusi atau redistribusi dalam perekonomian.

Dalam Islam penjaminan kelancaran distribusi ini sudah disistemkan melalui prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan syariah, misalnya kewajiban menjalankan mekanisme zakat dan mekanisme jual-beli yang diatur oleh syariah.

Dari perspektif lain dalam dunia usaha (ekonomi riil) kegiatan distribusi dapat juga diartikan sebagai usaha melancarkan penyebaran sumber daya sehingga kesejahteraan dapat dengan merata dirasakan. Artinya distribusi terjadi karena aktivitas ekonomi, seperti kegiatan jual-beli dan dunia kerja (*reward and effort*). Bahkan pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan disamping konsumen dan produsen. Sehingga menjadi penting tentunya konsep ekonomi Islam melihat posisi sector ini dalam mekanisme perekonomian menggunakan perspektif Islam.

“Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Hud : 85)

Fungsi distribusi dalam aktivitas ekonomi pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemashlahatan ummat. Ketika konsumen dan produsen memiliki motif utama adalah memenuhi kebutuhan maka distribusi sepatutnya melayani kepentingan ini dan memperlancar segala usaha menuju kearah motif dan tujuan ini.

Aktivitas usaha distribusi ini kemudian dituntut untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban yang diinginkan oleh syariat bagi konsumen dan produsen. Dengan kata lain, aktivitas distribusi sebaiknya sejalan dengan motif dan tujuan utama dari aktivitas

²¹ Muhammad Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme, Readings in Public Finance in Islam*, (Edited by Mahamoud A. Gulaid & Mohamed Aden Abdullah), Islamic Research and Training Institute (IRTI) – Islamic Development Bank (IDB), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 1995, pp. 181-184.

²² Tidak dapat dilakukan oleh semua individu bukan berarti individu tersebut tak mampu, tapi lebih karena alasan kesempatan yang tidak ada atau ketidakberdayaan akibat keadaan lingkungan diluar dirinya, artinya diluar kemampuan tenaga dan pikirannya.

produksi dan konsumsi, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Kebutuhan utama adalah kebutuhan dasar atau pokok yang harus menjadi prioritas utama untuk dipenuhi dari perekonomian yang dijalankan produsen, konsumen dan distributor. Sekali lagi bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dan penjaminan kelancarnya dalam perekonomian menjadi faktor penentu kestabilan ekonomi, politik dan sosial dalam kehidupan manusia.

Disamping faktor penjaminan distribusi yang dilakukan oleh mekanisme syariah (zakat) serta mekanisme ekonomi (jual-beli, *reward and effort*), peran pemerintah atau negara juga tidak kalah penting dalam memastikan kelancara distribusi ini. Negara dalam hal ini memiliki banyak pilihan berupa kebijakan atau instrumen dalam memastikan distribusi ini dapat berlangsung.

Kekayaan, Tabungan Dan Investasi

Dalam wacana ekonomi konvensional tabungan dan investasi dihubungkan dengan variable bunga (*interest rate*). Dengan begitu terlihat jelas bagaimana tabungan menjadi variable utama dari naik turunnya investasi. Jika tabungan diasumsikan sebagai variable yang juga dapat dipengaruhi, maka bungalah yang menjadi variable utama dalam hubungan tabungan dan investasi ini.

Seperti yang telah diketahui dalam teori ekonomi konvensional, bahwa optimalisasi ekonomi adalah ketika intermediasi keuangan yang diperlihatkan oleh tingkat tabungan dan investasi berjalan sempurna. Dengan kata lain jumlah tingkat tabungan berikut pertumbuhannya dapat diterjemahkan dengan sempurna berupa investasi. Namun yang ternyata luput menjadi objek analisa kalangan pakar ekonomi konvensional adalah kecenderungan dari bunga yang menjadi alat intermediasi tadi. Intermediasi menggunakan bunga sebagai alat ternyata memberikan hasil yang meleset. Bunga ternyata membentuk suatu pasar tersendiri, dibandingkan untuk mendorong pasar riil (investasi) sebagai tujuan dan konsekwensi intermediasi. Bunga cenderung membuat para pemegang kapital "menahan" uangnya dalam sistem bunga, dalam pasar yang ia bentuk, yaitu pasar keuangan, dimana sejumlah uang akan selalu memiliki harga sebesar bunga. Ya pasar keuangan dengan uang sebagai komoditi dan bunga sebagai harga. Sebenarnya pasar ini tidak memiliki korelasi kuat dan langsung dengan pasar riil. Artinya pasar keuangan yang dibentuk terpisah secara mekanis dan sistem dengan pasar riil (dikotomi). Lebih detail hal ini akan dibahas dalam pembahasan sistem moneter Islam pada bab selanjutnya.

Dan mekanisme inilah yang kemudian wujud dalam bangunan ekonomi konvensional. Pemerintah sebagai pemegang otoritas dari sistem keuangan, menggunakan bunga sebagai alat dalam mengontrol mekanisme yang ada dalam sistem keuangan dalam perekonomiannya, karena memang bunga menjadi harga rujukan (*banchmark*) atas produk yang ada dalam pasar moneter. Namun dalam ekonomi Islam, jelas bunga tak boleh berperan dalam perekonomian. Dengan absensinya bunga dari perekonomian, seperti apa wajah sistem keuangan? Atau seperti apa interaksi investasi dan tabungan?

Dalam bahasan ini akan secara sederhana kembali mendefinisikan dua variable ini dalam konteks perekonomian Islam. Tak dapat dipungkiri, ternyata Islam memiliki definisinya yang khas atas tabungan dan investasi, berikut mekanisme interaksinya dalam mendukung perekonomian secara luas.

Dalam perekonomian konvensional masih banyak terdapat kontradiksi-kontradiksi yang membingungkan perekonomian itu sendiri. Dalam kaitan investasi dan tabungan ini, disatu pihak perekonomian menuntut tingkat investasi tinggi dimana konsekwensi yang dituntut adalah tingkat bunga yang relatif rendah. Sementara dalam keadaan tersebut tabungan akan cenderung rendah, padahal diharapkan tingkat tabungan juga cukup besar agar dapat membantu pembiayaan pembangunan. Dengan demikian otoritas keuangan negara harus jeli dalam mengontrol tingkat bunganya. Dan tentu saja harus diakui fluktuasi bunga menjadi konsekwensi dari sistem ekonomi konvensional ini. Konsekwensi ini secara otomatis memperbanyak resiko yang harus dihadapi oleh sebuah perekonomian. Dan inilah salah satu fenomena yang memperlihatkan begitu tidak logisnya eksistensi bunga dalam perekonomian.

Untuk menghindari kompleksitas, pembahasan ini mengesampingkan keadaan dimana praktek keuangan Islam diimplimentasikan dalam konsep *dual sistem*, atau perekonomian yang mengakomodasi bunga (konvensional) dan juga bagi hasil (Islam). Pembahasan lebih berasumsi bahwa perekonomian secara utuh menggunakan konsep *interest-free based sistem*. Dan untuk memahami tabungan dan investasi dalam perspektif Islam, sebaiknya pemahaman tentang kekayaan perlu dimiliki. Oleh sebab itu sebelum membahas tabungan dan investasi, pembahasan tentang kekayaan (*wealth*) didahulukan.

1. Kekayaan (*Wealth*)

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara konsumsi, tabungan dan investasi, maka pembahasan tentang kekayaan perlu dilakukan. Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya (Bab Karakteristik Ekonomi Islam), kekayaan, harta atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh seseorang difungsikan sebagai pokok kehidupan. Artinya kekayaan tersebut semaksimal mungkin harus digunakan bukan hanya untuk kesejahteraan manusia pemiliknya tetapi juga manusia lain yang ada dalam kekurangan. Untuk menjelaskan hubungan perilaku konsumsi, tabungan dan investasi yang kesemuanya menggunakan kekayaan, tentu harus didefinisikan apa itu kekayaan (*wealth*; W).

Secara sederhana kekayaan (W) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bernilai ekonomi (berupa uang, barang atau hak cipta yang bersifat abstrak) yang dimiliki oleh seseorang baik yang bersumber dari pendapatannya maupun simpanannya (harta). Menjelaskan hubungan kekayaan (W) dengan konsumsi, tabungan dan investasi harus memahami beberapa kondisi dasar terlebih dahulu. Hubungan antara konsumsi dan kekayaan dihubungkan oleh peran pendapatan (Y), karena lazimnya perilaku konsumsi seorang individu berhubungan erat dengan besar – kecilnya pendapatan (daripada besar – kecilnya kekayaan). Sementara itu sebagian pendapatan tersebut merupakan sumber penambahan kekayaan seseorang. Sedangkan tabungan merupakan bagian dari kekayaan

yang bersumber dari penyisihan pendapatannya. Namun memahami bahwa tabungan bagi seorang muslim jumlahnya sangat tergantung pada motif berjaga – jaga yang ditentukan berdasarkan kebutuhan darurat pada masa yang akan datang, maka jumlahnya memiliki standard tertentu (*given*). Dengan argumentasi ini, dipahami bahwa jumlah tabungan boleh saja tidak bertambah ketika seseorang memperoleh pendapatan (Y) karena tingkat tabungannya telah mencapai jumlah yang maksimal bagi seseorang. Selanjutnya, investasi merupakan kekayaan seseorang yang diusahakan untuk mendapatkan kemashlahatan dan kemanfaatan secara materi (motif social/amal shaleh dan individual/profit). Investasi ini awalnya dapat berbentuk tabungan akumulasi penyisihan pendapatan ataupun harta lain yang kemudian diputar dalam berbagai bentuk usaha, baik yang investor tersebut lakukan sendiri atau ikut dalam bisnis pihak lain.

Ada perbedaan yang mendasar antara tabungan dan investasi dalam pemahaman ini, tabungan adalah sejumlah uang atau barang dalam jumlah yang relative tetap dengan maksud berjaga – jaga sedangkan investasi adalah harta seseorang yang jumlahnya dapat berkurang atau bertambah yang diputar atau ditanamkan dalam berbagai usaha. Tabungan dan investasi perbedaannya dapat juga dapat dilihat dari sifat likuidnya. Tabungan cenderung sangat likuid sedangkan investasi relative tidak likuid.

Bagaimana keterkaitan iman dalam pembahasan kekayaan ini? Seperti yang telah didiskusikan sebelumnya keimanan yang baik akan cenderung membuat perilaku konsumsi seseorang akan mendekati tingkat kebutuhan pokoknya. Dengan keimanan yang baik, maka jumlah tabungan akan cenderung *given*. Sedangkan investasi, seiring dengan bertambahnya kekayaan atau pendapatan akan semakin besar juga porsinya. Perilaku investasi ini relatif sama dengan perilaku pengeluaran amal shaleh seperti infaq, dan shadaqah. Bahkan pada kondisi keimanan puncak dapat diperkirakan penambahan pendapatan atau kekayaan seseorang tidak akan mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Pada kondisi tersebut konsumsi akan betul – betul sama dengan kebutuhan pokoknya, tabungan tidak akan bertambah jika sudah mencapai jumlah yang maksimal kebutuhan daruratnya. Namun yang akan berpengaruh adalah investasi dan pengeluaran amal shalehnya. Dalam kondisi keimanan puncak penambahan kekayaan atau pendapatan akan ditransfer sempurna berupa investasi dan pengeluaran amal shaleh. Bahkan investasi dapat berbentuk investasi sosial berupa wakaf (yang lazimnya terlepas kepemilikan harta tersebut dari si empunya).

Secara sederhana model dinamis kekayaan dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$W_t = mY_t + sY_t + iY_t + W_{t-1}; m + s + i = 1$$

Dimana:

- W_t = kekayaan (Wealth) waktu t
- Y_t = pendapatan
- m = bagian pendapatan yang dikonsumsi
- s_t = bagian pendapatan yang ditabung (marginal propensity to save; MPS) waktu t

i = bagian pendapatan yang diinvestasikan
 W_{t-1} = kekayaan (Wealth) waktu $t-1$

Prilaku konsumsi digambarkan oleh koefisien m , dengan penjelasan yang telah didiskusikan pada pembahasan prilaku konsumsi sebelumnya. Koefisien m meliputi pengeluaran individu yang bermotif kebutuhan pokok, sekunder/tersier/luxury dan amal shaleh. Sementara itu koefisien s menggambarkan preferensi individu dalam menabung, dimana diyakini jika keimanan seorang individu itu baik dan tingkat tabungannya telah mencapai jumlah maksimal maka s akan cenderung menurun atau mendekati 0. Ketika s mendekati 0, maka sebagai kompensasinya adalah i meningkat, mengingat $m + s + i = 1$. Sedangkan prilaku investasi sebenarnya dapat dilihat dari koefisien i dan variabel W_{t-1} , karena sumber investasi dapat berasal dari pendapatannya (Y) dan juga harta yang dimiliki saat itu (W_{t-1}).

2. Tabungan

Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekwensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah serta mereka (diri sendiri dan keturunannya) dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir.²³ Jadi dapat dikatakan bahwa motifasi utama orang menabung disini adalah nilai moral hidup sederhana (hidup hemat) dan keutamaan tidak fakir.

Dalam bahasan tabungan pada ilmu ekonomi konvensional, dijelaskan bahwa tabungan merupakan selisih dari pendapatan dan konsumsi. Tanpa dijelaskan secara detil apa yang menjadi motifasi dari tabungan tersebut. Dalam teori konvensional ini, relatif terlihat bahwa tabungan merupakan sebuah konsekwensi dari pendapatan yang tidak digunakan. Sehingga fungsi tambahan menabung atau kecenderungan menabung marjinal (*marginal propensity to save; MPS*) menjadi $MPS = 1 - MPC$, dimana MPC merupakan kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*) dari seorang individu.

Penjelasan kecenderungan tabungan ini juga disinggung dalam bahasan teori permintaan uang (*money demand*). Kita ketahui bahwa dalam wacana konvensional permintaan uang memiliki tiga motif utama, yaitu motif transaksi (*transaction*), motif berjaga-jaga (*precautionary*) dan motif spekulasi (*speculation*). Dalam Islam motif spekulasi tidak diakui, karena aktivitas ekonomi berupa spekulasi (maisir) dilarang secara syariah. Sehingga motif yang ada untuk memegang uang hanyalah motif untuk transaksi dan berjaga-jaga, atau dengan kata lain motif untuk konsumsi (memenuhi kebutuhan) dan menabung.

Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemashlahatan ummat secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu dimana masyarakat begitu membutuhkan harta atau dana, maka individu yang memiliki dana

²³ Kondisi dimana diyakini akan meningkatkan potensi manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah dan akhlak Islam (*kufur*).

lebih, akan mengurangi tingkat tabungannya atau lebih tepatnya mengurangi tingkat kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kekurangan. Mekanisme ini dapat berupa mekanisme sukarela atau mekanisme yang mengikat, artinya negara memiliki wewenang dalam memaksa individu yang berkecukupan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan mengenakan pajak khusus atau dikenal dengan *nawaib*²⁴ pada masyarakat golongan kaya. Dengan demikian tingkat tabungan dalam Islam memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi ekonomi.

Bagaimana hubungan tingkat tabungan ini dengan tingkat investasi dalam sebuah perekonomian Islam? Tabungan dalam ekonomi Islam tidak begitu kuat dihubungkan dengan investasi. Karena ketika tabungan dimotifasi oleh alasan berjaga-jaga, hidup hemat dan sederhana, maka tidak relevan akumulasi tabungan ini kemudian digunakan untuk investasi yang mekanismenya dalam Islam menggunakan skema bagi-hasil yang memiliki risiko rugi. Risiko yang dimiliki investasi bagi hasil tidak begitu sinkron dengan alasan para pemilik uang untuk menahan uangnya berupa tabungan. Meskipun hubungan itu akhirnya terjadi akibat mekanisme perbankan syariah saat ini yang menggunakan *benchmark* konvensional, dimana pos tabungan berjaga-jaga masyarakat dapat digunakan oleh bank pada sisi pembiayaannya, konsekwensinya pada sisi pendanaan bank syariah memberikan bonus kepada para nasabah tabungan yang bermotif berjaga-jaga tersebut. Selain itu, berdasarkan motif dan realita masyarakat Islam seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan konsumsi dan permintaan, bahwa masyarakat Islam terdiri atas masyarakat muzakki, mid-income dan mustahik, dapat disimpulkan bahwa mereka yang aktif dalam menabung adalah mereka yang masuk dalam golongan muzakki dan mid-income. Dan akumulasi tabungan secara teori akan relatif kecil jika dibandingkan akumulasi investasi, yang berarti juga peran tabungan dalam perekonomian akan relatif kecil. Dengan demikian tabungan tergantung pada besarnya pendapatan yang porsinya ditentukan oleh kebutuhan berjaga-jaganya. Dan ini perlu dirumuskan lebih spesifik untuk dapat mengkalkulasikan posisi dan peran tabungan dalam perekonomian.

Sementara itu apa yang diyakini dalam konvensional bahwa tabungan atau *excess income* yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang akan menjadi "potensi investasi" dapat saja dibenarkan dalam Islam, sepanjang memang kebutuhan mereka pada konsumsi pokok dan motif berjaga-jaga telah terpenuhi. Walaupun begitu menyebutkan kelebihan tersebut sebagai tabungan juga mungkin kurang tepat, karena memang ada intensi dari si pemilik untuk menggunakan kelebihan tersebut sebagai modal untuk men-*generate* keuntungan selanjutnya (investasi)²⁵. Sehingga tabungan jenis ini merupakan potensi investasi yang harus menjadi perhatian para regulator dalam rangka membuat sebuah kebijakan, baik di sektor riil maupun di sektor moneter. Secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi atau produk keuangan syariah yang mampu menyerap "potensi investasi", sehingga waktu memegang uang oleh setiap

²⁴ Pajak ini sifatnya kondisional atau berlaku sementara, artinya diberlakukan sepanjang kondisi masyarakat memerlukan pajak ini. Ketika kondisi ekonomi sudah membaik, maka pajak ini pun tidak lagi dipungut. Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*, The Islamic Foundation, Leicester UK, 1996.

²⁵ Definisi tabungan disini bermakna dua; pertama tabungan yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan yang ditujukan untuk investasi. Tentu saja investasi yang produktif, bukan investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh konvensional, dimana aktivitas spekulasi masuk dalam definisi investasi ini.

pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin. Dengan kata lain penyediaan regulasi berupa peluang usaha atau produk-produk keuangan syariah akan semakin meningkatkan *velocity* dalam perekonomian. Dengan demikian perhatian regulasi moneter tidak tertuju pada konsep *money supply* seperti yang dianut konvensional, tapi lebih pada *velocity* perekonomian.

Hubungan tabungan dan investasi dalam perekonomian Islam yang khas ini memang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh konvensional. Sehingga perlu sebuah konsep pendekatan analisa ekonomi yang mampu memberikan penjelasan yang cukup tepat tentang posisi serta hubungan tabungan dan investasi dalam sistem ekonomi Islam, juga peran keduanya dalam memajukan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, satu hal yang juga patut mendapat perhatian adalah perilaku menabung dari masyarakat non-muslim dimana mereka tidak terekspos oleh risiko zakat. Dalam sebuah negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam, masyarakat non-muslim akan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga muslim namun dalam bentuk yang berbeda. Perlindungan kebutuhan dasar dan hak-hak sipil lainnya tak berbeda dengan warga muslim, tapi mereka juga dikenakan kewajiban membayar *kharaj* (pajak tanah) dan *jizyah* (pajak individu) layaknya muslim membayarkannya berupa zakat. Dengan begitu warga non-muslim juga menghadapi risiko harta *idle*-nya berkurang, sehingga menabung akan juga tetap terjaga pada porsi yang sama dengan tabungan warga muslim dengan motif berjaga-jaga. Sementara kelebihan uang atau harta warga non-muslim akan "dipaksa" untuk masuk dalam mekanisme investasi yang sebenarnya. Yaitu investasi yang berkaitan dengan usaha produktif di sektor riil.

3. Investasi

Dengan absennya bunga dalam perekonomian, hubungan investasi dan tabungan dalam perekonomian Islam tidak sekuat seperti yang ada dalam konvensional. Dalam konvensional hubungan investasi dan tabungan dihubungkan oleh peran bunga dalam perekonomian. Sehingga bunga menjadi indikator fluktuasi yang terjadi di investasi dan tabungan. Ketika bunga (bunga simpanan dan bunga pinjaman) tinggi maka kecenderungan tabungan akan meningkat, sementara investasi relatif turun. Begitu sebaliknya, ketika bunga rendah, maka tabungan akan menurun dan investasi akan meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi dalam aktivitas tabungan dan investasi dalam konvensional didominasi oleh motif keuntungan (*returns*) yang bisa didapatkan dari keduanya.

Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, investasi bukanlah melulu bercerita tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tapi ada beberapa faktor yang mendominasi motivasi investasi dalam Islam. Pertama, akibat implementasi mekanisme zakat maka asset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu (memenuhi batas nisab zakat) akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelolanya melalui investasi. Dengan demikian melalui investasi tersebut pemilik asset memiliki potensi mempertahankan jumlah dan nilai assetnya. Berdasarkan argumentasi ini, aktifitas investasi pada dasarnya lebih dekat

dengan perilaku individu (investor/muzakki) atas kekayaan atau asset mereka daripada perilaku individu atas simpanan mereka. Sejalan dengan kesimpulan bahwa sebenarnya ada perbedaan yang mendasar dalam perekonomian Islam dalam membahas perilaku simpanan dan investasi, dalam Islam investasi lebih bersumber dari harta kekayaan/asset daripada simpanan yang dalam investasi dibatasi oleh definisi bagian sisa dari pendapatan setelah dikurangi oleh konsumsi.

Kedua, aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi social yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan bersyariat (musyarakah) maupun dengan berbagi hasil (*mudharabah*). Jadi dapat dikatakan bahwa investasi dalam Islam bukan hanya dipengaruhi factor keuntungan materi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh factor syariah (kepatuhan pada ketentuan syariah) dan factor sosial (kemashlahatan ummat).

Melihat praktek ekonomi kontemporer, definisi investasi cenderung meluas dari definisi orisinalnya. Definisi investasi kini juga digunakan dalam menggambarkan aktivitas penanaman sejumlah capital dalam pasar keuangan konvensional, dimana aktivitasnya berbeda jauh dengan maksud yang terkandung dalam kata investasi itu sendiri yang biasa digunakan dalam sector riil.²⁶

Masuk pada makna investasi di sector keuangan tentu aktivitas ini lebih dekat dengan motivasi spekulasi dan *capital gain*. Perilaku investasi seperti ini tentu akan memberikan wajah atau corak ekonomi yang berbeda, bahkan konsekuensi terhadap interaksi dalam mekanisme ekonomi juga akan sangat berbeda dengan sistem ekonomi non-spekulasi (syariah). Dan yang pasti teori-teori yang terbangun dari analisa perilaku dan kecenderungan dalam mekanisme perekonomian konvensional tentu akan berbeda dengan perekonomian Islam (atau bahkan bertolak belakang). Jadi perlu ditegaskan kembali, bahwa dalam perekonomian Islam spekulasi dalam segala bentuknya atau menanamkan dana atas motif profit atau return dalam bentuk bunga (*interest rate*) bukanlah investasi!

Selanjutnya melihat segmentasi masyarakat Islam, maka golongan masyarakat yang aktif melakukan aktifitas investasi adalah golongan masyarakat muzakki. Golongan masyarakat ini memiliki potensi melakukan investasi akibat sumber daya ekonominya berlebih setelah memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk berjaga-jaga. Investasi ini tentu akumulasi dan perannya dalam perekonomian secara makro sangat besar. Dengan berfungsinya sistem zakat dan dilarangnya riba serta spekulasi, maka akumulasi dana besar yang dimiliki oleh golongan muzakki akan ditransfer menjadi investasi, sebagai reaksi untuk menghindari risiko berkurangnya harta mereka akibat kewajiban zakat dan motif ingin menjaga atau bahkan menambah jumlah kekayaan (harta) para

²⁶ Dalam aplikasi investasi sector riil konvensional juga lazimnya memang berbeda dengan aplikasi syariah. Di konvensional aktifitas investasi lekat dengan konsep bunga dimana setiap investasi yang terjadi diasumsikan selalu berakhir untung (positif). Investasi konvensional tidak mengakomodasi kemungkinan rugi. Berbeda dengan syariah, system ini menggunakan konsep bagi hasil dimana asumsi dasarnya adalah kefitrahan usaha yang dapat untung dan dapat pula rugi.

muzakki. Berarti akumulasi investasi tersebut akan terus berputar dan berputar. Dengan begitu tingkat velocity akan terjaga atau bahkan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah akumulasi investasi.

Jadi dapat disimpulkan investasi dalam Islam ditentukan oleh beberapa variabel yang diantaranya adalah ekspektasi keuntungan pada sebuah proyek, pendapatan dan kondisi perekonomian (bukan oleh tingkat bunga yang selama ini dikenal dalam teori ekonomi konvensional²⁷).

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab tabungan, warga non-muslim yang memiliki kelebihan uang atau harta (*idle money*) tidak diberi kesempatan oleh sistem untuk bisa menanamkannya dalam pasar keuangan karena pasar tersebut tidak ada (*no interest rate and speculative transaction*). Pasar keuangan dalam arti konvensional tentunya. Sehingga kelebihan uang atau harta dari warga non-muslim akan mengalir pada aktifitas investasi.

Pembahasan perilaku tabungan dan investasi dalam perspektif Islam ini akan menjadi salah satu landasan dalam pendefinisian dan pengembangan sistem moneter Islam. Karena perilaku tabungan dan investasi dalam Islam jelas sekali berbeda dengan apa yang diyakini dalam ekonomi konvensional.

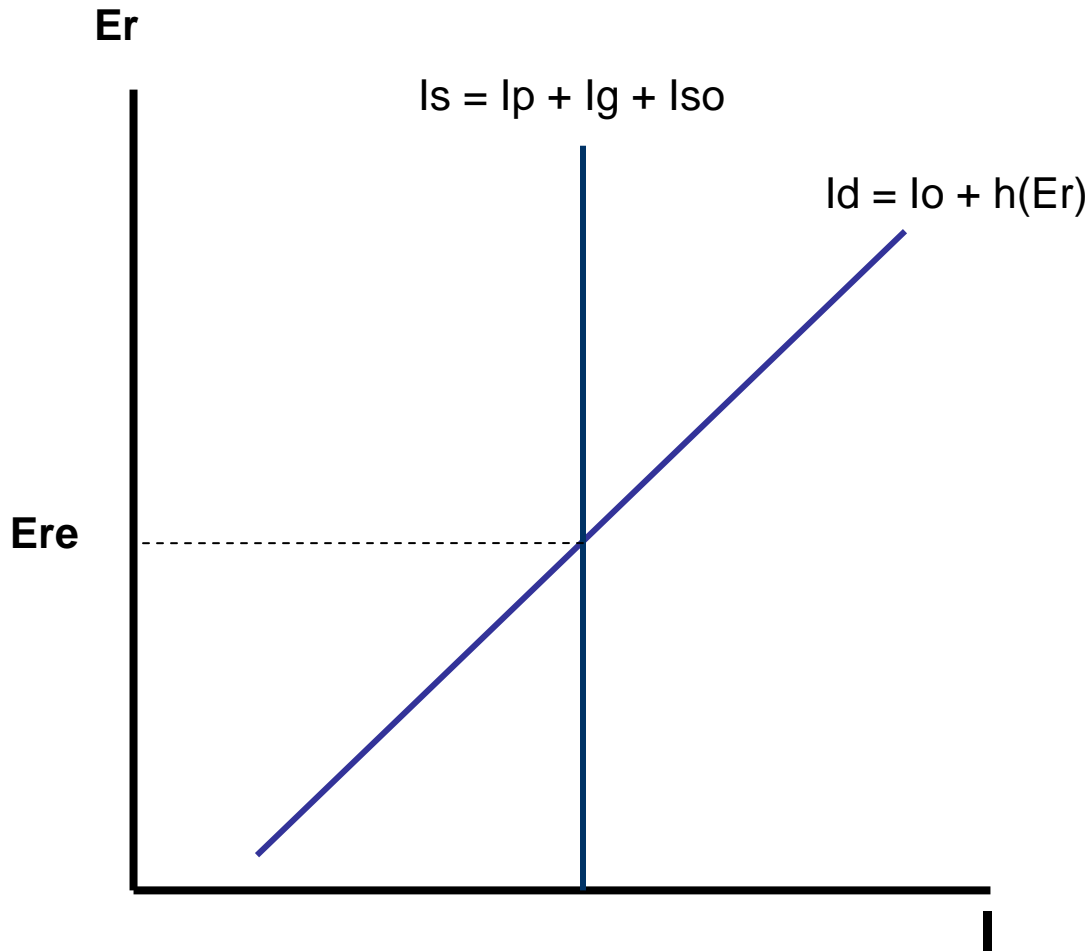
Menggunakan definisi dan mekanisme investasi yang telah disebutkan diatas, maka investasi menjadi sektor yang tidak kalah penting dalam perekonomian. Sektor inilah yang menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi riil dapat bergerak melalui penyediaan instrument-instrumen investasi dan preferensi golongan pemilik modal untuk menggunakan dananya. Realisasi investasi tentu saja ditentukan oleh dua kekuatan pasar, yaitu penawaran investasi dan permintaan investasi.

Apa yang menjadi objek penawaran dan permintaan investasi? Jawaban dari pertanyaan ini menjadi sangat penting dalam memahami konsep investasi, dimana konsep ini secara berulang dan intens dibahas pada bab – bab selanjutnya dalam buku ini. Secara sederhana yang menjadi objek dari pasar investasi adalah proyek – proyek investasi, yang menunjukkan berapa besar realisasi aktifitas usaha yang dilakukan oleh pemilik modal untuk memproduksi barang dan jasa. Merekalah, pemilik modal, yang menjadi inisiator wujudnya usaha – usaha yang menyediakan kebutuhan atau permintaan akan barang dan jasa. Namun dalam aktifitas pasar selama ini, ternyata terdapat segolongan pelaku ekonomi yang ingin ikut secara keuangan dalam proses usaha tersebut. Bahkan tak jarang keberadaan mereka menjadi urgen menentukan perkembangan kuantitas usaha (bisnis) yang ada, disamping memang inisiator tidak mampu memenuhi skala ekonomi dan produksi yang diinginkan oleh pasar, hal ini wujud akibat nature aktifitas ekonomi yang sejak dulu tidak pernah lepas dari kerangka kerjasama yang menguntungkan melalui proses sharing baik risiko, untung maupun rugi.

²⁷ Hubungan investasi dengan tingkat bunga ini bukannya tak memiliki kelemahan, fungsi $I = I_0 - g_i$ sudah banyak dianalisa dan diungkapkan kelemahan-kelemahannya oleh pakar-pakar ekonomi konvensional itu sendiri. Dan bahkan beberapa pakar memiliki bukti empiris atau kesimpulan dalam beberapa artikel ilmiah mereka bahwa hubungan investasi dan tingkat bunga sangatlah lemah.

Pada aplikasinya, keseimbangan keduanya kemudian akan membentuk tingkat ekspektasi keuntungan (*expected return*) pada pasar investasi. Keterlibatan pemilik modal (yang membentuk permintaan investasi) yang menanamkan dananya dalam proyek investasi pada gilirannya akan membentuk informasi pasar tentang ekspektasi keuntungan dalam berusaha.²⁸

Kurva 4.6.
Pasar Investasi



Penawaran proyek investasi dalam perspektif Islam secara garis besar bersumber dari investasi yang inisiatifnya berasal dari sektor swasta (Ip), pemerintah (Ig) dan social (Iso). Dari sector swasta, pelaku ekonomi akan memulai usaha dengan ekspektasi keuntungan yang mereka perhitungkan pada masa yang akan datang. Berapapun tingkat

²⁸ Perlu diakui bahwa konsep pasar investasi ini perlu dikaji lebih mendalam relevansi dan kemapanan teorinya, namun penulis mengharapkan konsep ini mampu menjadi referensi pengembangan selanjutnya atau bahkan menjelaskan beberapa hal dalam hipotesa – hipotesa fenomena ekonomi Islam, baik perilaku ekonomi pada skala mikro maupun kecenderungan system pada skala makro.

ekspektasi keuntungan sepanjang keuntungan tersebut tidak negative (≥ 0), maka seorang pengusaha akan melakukan usaha bisnis. Dengan kata lain inisiatif atau preferensi usaha seorang pelaku bisnis tidak terpaku pada tingkat keuntungan tertentu.²⁹ Disamping itu ada juga investasi yang ditawarkan oleh pemerintah (I_g), dengan karakteristik investasi yang lebih pada pembangunan infrastruktur atau fasilitas – fasilitas publik. Atau tidak jarang pada investasi di sektor-sektor sumber daya ekonomi yang vital bagi negara, seperti minyak dan gas bumi, pembangkit listrik, informasi dan lain-lain. Selain itu investasi juga dapat berasal dari masyarakat itu sendiri melalui mekanisme sosial Islam (I_{so}). Dalam hal ini instrumen sosial Islam yang sangat lekat dengan investasi sosial adalah instrumen wakaf. Peran dan fungsi wakaf secara umum adalah sebagai sumber investasi sosial bagi masyarakat. Investasi sosial tersebut meliputi pengadaan pelayanan medis (klinik, puskesmas, obat murah dan lain-lain), tempat ibadah, jembatan, sekolah dan lain sebagainya. Keberadaan wakaf betul-betul merupakan inisiatif masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan tingkat keimanan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, penawaran investasi dapat digambarkan dengan menggunakan model investasi sebagai berikut:

$$I_s = I_p + I_g + I_{so}$$

Penawaran investasi ini bersifat *autonomous*, dimana besarnya relatif tidak tergantung pada keuntungan ekspektasi (*expected return* – Er). Hal ini mengakibatkan gambaran kurva penawaran investasi menjadi vertikal, yang bermakna berapapun perubahan ekspektasi keuntungan tidak membuat jumlah penawaran investasi berubah. Jumlah penawaran investasi lebih disebabkan inisiatif pelakunya yaitu pelaku bisnis, pemerintah dan sektor sosial.

Sementara itu permintaan investasi cenderung terdiri atas dua komponen. Yang pertama komponen investasi *autonomous* (I_o) yang tidak tergantung pada variabel lain, boleh jadi komponen ini ada akibat preferensi investor untuk berinvestasi dengan motif bersifat individual (keinginan diri sendiri - I_{riil}) dan sosial (amal shaleh – I_{amal shaleh}). Permintaan akan investasi sosial ini pula yang kemudian menimbulkan respon adanya penawaran projek – projek investasi bersifat sosial.

Sedangkan yang kedua investasi yang tergantung pada besar kecilnya ekspektasi keuntungan. Investasi ini muncul disebabkan oleh kecenderungan pemilik modal ingin mempertahankan (termasuk menambah) tingkat kekayaan yang mereka miliki, karena pada tingkat kekayaan tertentu para investor yang notabene adalah muzakki akan teresponse oleh risiko zakat. Artinya zakat akan mengurangi jumlah kekayaan mereka ketika kekayaan mereka mencapai atau melebihi jumlah tertentu (nishab). Oleh sebab itu, sebagai tindakan balik dalam rangka mempertahankan tingkat kekayaannya, maka seorang investor/muzakki memiliki pilihan yaitu memberdayakan kekayaannya untuk

²⁹ Hal ini terjadi juga atas asumsi bahwa individu yang memahami nilai – nilai Islam melakukan inisiatif usaha, selain mempertimbangkan tingkat keuntungan tapi juga melihat kemashlahatan yang bias diberikan kepada individu lain disekitarnya. Mungkin dengan tingkat keuntungan sama dengan 0 pun seorang pelaku bisnis akan memulai usahanya jika pada saat yang sama ia merasa akan banyak keuntungan yang diambil oleh lingkungannya.

memperoleh keuntungan atau menambah kekayaan mereka. Dalam perspektif lain penggunaan kekayaan investor/muzakki sebenarnya adalah membuka peluang individu lain untuk memperoleh manfaat dari kekayaan mereka. Seperti mereka yang tidak memiliki modal tapi memiliki keahlian dalam berbagai usaha bisnis atau ekonomi. Dengan demikian, model permintaan investasi dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$I_d = I_o + h(E_r)$$

Dimana:

h = sensitifitas permintaan terhadap E_r

$I_o = kW + lW$; $k + l = 1$, atau

$I_o = I_{riil} + I_{amal\ shaleh}$

Dimana:

$I_{riil} = kW$

$I_{amal\ Shaleh} = lW$

k = bagian kekayaan yang diinvestasikan bermotif pribadi

l = bagian kekayaan yang diinvestasikan bermotif sosial

W = kekayaan (Wealth)

Pada sisi permintaan investasi, keikutsertaannya kelompok pemilik modal tergantung pada keberadaan usaha yang telah ada dipasar, dimana mereka menempatkan sebagian modalnya (uang) pada usaha yang ada, sehingga besar – kecil jumlah investasi atau penanaman modal mereka pada proyek investasi tergantung pada besar – kecil ekspektasi keuntungan yang ada. Semakin besar ekspektasi keuntungan, maka akan semakin besar permintaan terhadap proyek investasi tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika ekspektasi keuntungan kecil, maka permintaan proyek investasi pun akan turun. Seberapa besar penurunan permintaan investasi sangat tergantung pada tingkat sensitifitas permintaan tersebut terhadap pergerakan naik – turunnya ekspektasi keuntungan (h).

Dari interaksi keduanya, keseimbangan antara permintaan dan penawaran investasi membentuk atau menentukan ekspektasi keuntungan dipasar (investasi). Dari aktifitas investasi inilah kemudian mampu menjelaskan dukungan sektor ini terhadap aktifitas ekonomi riil di pasar barang dan jasa. Oleh karena aktifitas investasi merupakan aktivitas dominan dalam pasar modern saat ini, akan sangat beralasan memasukkan sektor ini dalam penjelasan keseimbangan umum ekonomi Islam. Pada bab – bab selanjutnya pembahasan sektor investasi ini akan semakin detil dijabarkan. Karena membahas sektor keuangan Islam tidak mungkin dijelaskan menggunakan model seperti apa yang konvensional miliki, sehingga diperlukan model yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan ketentuan – ketentuan hukum syariah Islam.

Nilai – nilai moral berikut ketentuan – ketentuan hukum syariah Islam dapat dilihat modelnya atau realisasinya jika ia diwujudkan dalam prilaku – prilaku ekonomi. Dan sebenarnya proses memadankan prilaku ekonomi manusia dengan nilai moral dan ketentuan hukum syariah Islam inilah yang merupakan titik krusial dalam teori prilaku

ekonomi Islam. Proses tersebut bahkan sewajarnya menjadi asumsi dasar atas bangunan teori ekonomi Islam.

Prilaku ekonomi memang sangat terkait dengan preferensi manusia dalam berfikir dan bertindak. Preferensi manusia tersebut sangat tergantung pada nilai – nilai yang diyakininya, baik nilai yang memang telah melekat pada dirinya sebagai kefitrahan manusia yang bersifat internal, maupun nilai yang berasal dari luar diri dimana lingkungan manusia hidup yang bersifat eksternal. Nilai – nilai internal tersebut meliputi nilai egoisme, nafsu, kebutuhan, keinginan atau kepentingan. Sementara nilai eksternal dapat berupa keyakinan agama, nilai hidup dan kehidupan, pengetahuan atau pengalaman.

Dalam ekonomi Islam, Islam sebagai agama sekaligus pedoman hidup, menjadi rujukan pertama dan utama bagi manusia dalam berperilaku ekonomi. Dengan kata lain, Islam bukan hanya menjadi ketentuan yang mengikat bagi manusia dalam bertindak ekonomi tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan – pengembangan aktifitas dan sistem perekonomian. Dengan demikian nilai – nilai Islam menjadi warna yang dominan dalam prilaku manusia pada semua jenis aktifitas ekonomi, seperti prilaku konsumsi, produksi, distribusi, menabung dan investasi. Dan adopsi nilai – nilai Islam ini pada dasarnya menggambarkan seberapa jauh kadar keimanan manusia (Islam) dalam berperilaku ekonomi.

Dan dari nilai Islam ini akan terlihat warna prilaku ekonomi yang senada pada semua aktifitasnya, misalnya unsur prilaku ekonomi yang tidak melepaskan diri pada motif sosial atau amal shaleh. Motif amal shaleh tersebut tentu akan tergambar dalam prilaku konsumsi, produksi, distribusi, menabung dan investasi para pelaku ekonomi. Ciri khas yang menggambarkan warna Islam dalam motif prilaku ekonomi tergambar misalnya dalam produk atau barang dan jasa yang tersedia di pasar. Contohnya semakin besar nilai – nilai Islam dianut atau ketika keimanan para pelaku ekonomi cukup baik, maka diyakini produk yang tercipta dan tersedia adalah produk-produk yang tidak memperlihatkan ketimpangan. Artinya dengan keimanan yang baik yang dimiliki oleh masyarakat maka tidak akan ada kecenderungan terjadi fenomena - fenomena paradoks ekonomi, seperti larisnya produk luxury namun pada saat yang sama produk kebutuhan pokok sulit diakses oleh sebagian masyarakat. Dari warna yang memiliki karakteristik seperti ini, pada akhirnya perekonomian dapat memiliki parameter khas sejauh mana para pelaku ekonomi sejalan dengan nilai – nilai Islam sebagai landasan bertindak ekonomi. Parameter – parameter tersebut seperti konsumsi atau investasi yang bermotif amal shaleh. Selanjutnya parameter ini bahkan dapat menjadi ukuran kesuksesan makroekonomi sebuah negara, karena pada dasarnya kesuksesan negara dalam ekonomi adalah sejauh mana perekonomian tersebut semakin mendekatkan para manusianya kepada Sang Pencipta, seberapa jauh perekonomian semakin meningkatkan keimanan masyarakat secara individu dan kolektif.

Prilaku manusia dengan segala faktor yang mempengaruhinya merupakan titik tolak analisa ekonomi. Seperti apa bentuk bangunannya, institusi yang melengkapinya, kebijakan – kebijakan yang dibuat dan integrasi setiap mekanisme ekonomi sangat

tergantung atau dipengaruhi oleh perilaku manusia pada segala aktivitas ekonomi. Islam sebagai sebuah jalan hidup, sistem hidup dan agama menjadi inspirasi, rujukan dan hukum bagi setiap individu untuk berperilaku pada semua sisi hidup dan kehidupannya, termasuk aktivitas ekonomi. Besar kecilnya pengaruh Islam terhadap ekonomi dari sisi perilaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh keyakinan atau keimanan pada Islam, karena perilaku manusia baik secara individu maupun kolektif akan memiliki kadar preferensi yang ditentukan oleh kadar keimanannya. Dari pembahasan perilaku ekonomi ini kembali ingin diyakinkan bahwa berislam dan berekonomi bukan dua hal yang terpisah. Islam dan ekonomi memiliki hubungan sebab dan akibat, sumber hukum dan sistem atau ide dan inovasi. Yang pada hakikatnya menempatkan Tuhan sebagai titik sentral perhatian dari setiap aktivitas dan ketentuan apapun, termasuk ekonomi.